PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG APARUKA DISTRIK MIMIKA BARAT TAHUN 2025

"Membangun dari Kampung Ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota"



KATA PENGANTAR PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, proses penyusunan **Profil dan Potensi Kampung Aparuka Distrik Mimika Barat** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis mendukung akselerasi pembangunan kampung yang berorientasi pada data akurat dan informasi faktual hasil observasi serta pengumpulan data lapangan. Melalui proses yang sistematis, terverifikasi dan partisipatif, dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kampung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Atas nama Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM), kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atas kepercayaan yang diberikan kepada IPPM sebagai lembaga penyusun. Kepercayaan ini merupakan tanggungjawab besar yang kami emban dalam mendukung pembangunan kampung yang lebih terarah, partisipatif dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik dalam pengumpulan data, mobilisasi ke lapangan, maupun koordinasi lintas pihak. Namun berkat kerja keras tim serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas PMK dan staf, Kepala Distrik Mimika Barat beserta seluruh staf, Kepala Kampung Aparuka dan aparat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi, waktu dan bantuan selama proses pengumpulan data berlangsung. Kontribusi semua pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan dokumen ini.

Kami juga sangat mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen pada tahap berikutnya. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan kampung di kabupatem Mimika yang lebih maju dan mandiri.

Jayapura, 15 Desember 2025
Direktur IPPM,

Yohannes Rahail

KATA PENGANTAR KEPALA KAMPUNG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Profil Kampung Aparuka ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya bersama Pemerintah Kampung Aparuka dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, serta mencerminkan kondisi riil kehidupan masyarakat kampung.

Penyusunan Profil Kampung Aparuka bertujuan untuk menggambarkan secara utuh kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi kampung. Profil ini diharapkan menjadi basis data dan rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan kampung, penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung, serta sebagai bahan pendukung dalam musyawarah kampung dan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kabupaten.

Dokumen Profil Kampung ini juga memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tersedianya data yang valid dan mutakhir, Pemerintah Kampung Aparuka dapat merancang program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi kampung.

Saya berharap Profil Kampung Aparuka ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kampung. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan kampung yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Kampung Aparuka.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kampung Aparuka ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kampung Aparuka dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mimika, 16 Desember 2025
Kepala Kampung Aparuka,

Yonas Kenaroke

KATA PENGANTAR KEPALA DISTRIK

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, penyertaan, dan tuntunan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Aparuka** di wilayah Distrik Mimika Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan kampung yang berbasis pada data dan informasi faktual di lapangan, sehingga setiap perencanaan dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas Pemerintah Kampung, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi riil, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat kampung. Melalui Profil Kampung ini, diharapkan Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas dan komprehensif dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ke depan.

Atas tersusunnya dokumen ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah bekerja secara profesional sebagai tim penyusun. Dengan metodologi yang terstruktur, berbasis bukti, serta didukung oleh proses pengumpulan data lapangan yang komprehensif, IPPM telah menghasilkan dokumen yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat Kampung Aparuka di Distrik Mimika Barat yang telah memberikan dukungan, data, informasi, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan dokumen ini berlangsung.

Semoga Dokumen Profil dan Potensi Kampung Aparuka ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri, produktif, dan berkeadilan.

Mimika, 18 Desember 2025
Kepala Distrik Mimika Barat,

Christian Warinussy, S.Sos

SAMBUTAN KEPALA DINAS PMK MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Aparuka Distrik Mimika Barat** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat pembangunan kampung yang berbasis pada data yang akurat, informasi faktual serta pemetaan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta mitra profesional yang berkompeten. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Distrik Mimika Barat beserta jajaran, Kepala Kampung Aparuka bersama seluruh aparat kampung, serta masyarakat Kampung Aparuka yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan aktif selama proses pengumpulan dan verifikasi lapangan. Kontribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi objektif dan dinamika nyata kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) selaku tim penyusun. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur, IPPM telah melaksanakan proses penyusunan dokumen ini dengan observasi langsung, kajian analitis, serta verifikasi data secara berjenjang. Meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan tantangan lapangan, IPPM mampu menyelesaikan dokumen ini secara baik, akurat dan sesuai dengan kaidah penyusunan profil kampung. Dedikasi tersebut merupakan kontribusi penting dalam mendukung percepatan pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejalan dengan terbitnya dokumen ini, kami berharap penyusunan profil dan potensi kampung dapat diperluas dan direplikasi ke seluruh kampung di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya basis data kampung yang lengkap, mutakhir, dan terpadu, setiap kampung diharapkan mampu berkembang sebagai model perencanaan pembangunan berbasis data, serta menjadi rujukan dalam pengembangan inovasi, penguatan tata kelola pemerintahan kampung, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dokumen Profil dan Potensi Kampung ini memiliki nilai strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, baik di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten. Data yang lengkap dan komprehensif akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta penguatan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan dapat memperkuat identitas kampung serta membuka ruang pengembangan potensi unggulan yang berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen ini terus diperbarui secara berkala dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Semoga kerja kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Kepala Dinas,

Abraham Y. Kateyau, SE., MH

SAMBUTAN BUPATI MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraan dan penyertaan-Nya, Kabupaten Mimika terus berbenah dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan "Membangun dari kampung ke kota", maka **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Aparuka** dapat diselesaikan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang mendasar. Kebijakan Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih kontekstual, partisipatif, serta selaras dengan karakter sosial, budaya dan kondisi geografis masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Dokumen strategis ini menegaskan tiga pilar utama pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, sebagai upaya mempercepat transformasi pembangunan Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus menjawab ketertinggalan kualitas sumber daya manusia yang bersifat struktural.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, kita menyadari bahwa tantangan pembangunan masih bersifat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan antar wilayah masih nyata, terutama antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dengan kampung-kampung di wilayah pedalaman dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kuatnya peran adat dan tradisi menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi kampung yang akurat, lengkap dan mutakhir. Selama ini, basis data kampung yang terpadu belum sepenuhnya tersedia, sehingga perencanaan pembangunan sering kali belum didukung oleh landasan teknokratis yang kuat. Untuk itu penyusunan profil dan potensi kampung menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai fondasi pembangunan yang objektif, terukur dan berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi pembangunan tahun 2024-2029, “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas”, menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dimulai dari kampung dengan pendekatan **“**Membangun dari Kampung ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota.” Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai titik awal pembangunan wilayah, dengan perencanaan yang komprehensif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Penyusunan profil dan potensi kampung berbasis satu data merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi pendekatan tersebut.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyusunan dokumen ini. Dengan tersusunnya dokumen Profil dan Potensi Kampung Aparuka ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan kampung secara sistematis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data yang tersaji tidak hanya menjadi pijakan perencanaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas kampung, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing kampung secara berkelanjutan.

Akhir kata, saya berharap dokumen ini dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dan terus diperbarui secara berkala. Semoga upaya ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Bupati,

Johannes Rettob, S.Sos., MM

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Penyusun ii
Kata Pengantar Kepala Kampung iii
Kata Pengantar Kepala Distrik iv
Sambutan Kepala Dinas PMK v
Sambutan Bupati Mimika vii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii

Bagian I. **PENDAHULUAN** 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Manfaat 3
Bagian II. **METODOLOGI** 5
Bagian III. **PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG** 10
A. Keadaan Wilayah Kampung 10
1. Sejarah 10
2. Keadaan Wilayah 18
B. Keadaan Perumahan 21
1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah 21
2. Pola Permukiman 22
3. Kepemilikan Rumah 23
4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar 24
5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga 24
6. Kondisi Lingkungan Permukiman 25
7. Masalah utama dan Kebutuhan perumahan 26
C. Kependudukan 27
1. Suku-suku di Kampung 27
2. Nilai dan Kearifan Lokal 28
3. Keadaan Penduduk 30
4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk 38
D. Pendidikan 39
1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan 39
2. Kelembagaan Pendidikan 41
3. Keadaan Guru dan Murid 42
4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar 43
5. Pendidikan NonFormal 44

E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana 46
1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit …… 46
2. Kesehatan ……. 48
3. Gizi …….. 50
4. Keluarga Berencana ……. 52
F. Ekonomi Masyarakat 55
1. Aktivitas Penduduk …….. 55
2. Kepemilikan Modal ……. 55
3. Kelembagaan Ekonomi …… 56
4. Harga Barang dan Bahan Makanan ……. 57
5. Potensi dan Peluang Ekonomi …….. 58
6. Tingkat Kesejahteraan …….. 59
G. Keamanan dan Ketertiban 61
1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban …….. 61
2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban …….. 62
H. Kelembagaan Kampung 62
1. Lembaga pemerintah 62
2. Lembaga Politik 64
3. Lembaga Kamtibmas 65
I. Sarana Prasana 65
1. Transportasi dan Komunikasi …….. 65
2. Air Bersih dan Sanitasi ……. 66
3. Penerangan / Energi ……. 67
4. Pendidikan ……... 68
5. Kesehatan ……. 69
6. Ekonomi ……... 69
7. Peribadatan …….. 70
Bagian IV. **PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG** …….. 72
A. Infrastruktur Kampung Berstandar Kota 72
B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal 72
C. SDM, Budaya, dan Lingkungan Berkelanjutan 73
Bagian V. **PENUTUP** 75

Daftar Pustaka 76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Kampung Aparuka menurut Umur Tahun 2025 . 32

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk KampungAparuka menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 34

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Aparuka menurut Matapencaharian Tahun 2025 35

Tabel 3.4 Harga Kebutuhan Sembako, Pakaian Tahun 2025 58

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota Di Kampung Aparuka . 72

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal Di kampung Aparuka 73

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan Di kampung Aparuka 74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Peta Titik Lokasi Kampung Aparuka 9

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Aparuka 63

Gambar 3.2 Struktur BPD Kampung Aparuka 64

BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka kebijakan pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan mendasar. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara kontekstual dan partisipatif sesuai karakteristik sosial, budaya dan geografis daerah.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPPP menekankan tiga (3) pilar utama pembangunan yakni "Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif". Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi pembangunan yang berpihak pada rakyat Papua secara responsive, menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mengatasi ketertinggalan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua yang selama ini terjadi secara struktural dan sistemik.

Di Kabupaten Mimika, tantangan pembangunan masih sangat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan kampung-kampung di pedalaman dan wilayah pinggiran yang masih tertinggal (dataran pesisir dan pegunungan). Kondisi geografis yang sulit, rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur, dan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap norma-norma adat dan tradisi lokal turut mempengaruhi lambatnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat bergantung pada kemampuan memahami potensi dan permasalahan kampung secara lebih mendalam, faktual dan berbasis data yang akurat. Namun hingga saat ini belum tersedia satu basis data kampung yang lengkap, terpadu dan terbarukan yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan kampung secara objektif, terukur dan berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi-misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil, objektif dan berdaya saing menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera), telah menetapkan arah kebijakan "Membangun dari Kampung ke Kota", dengan pendekatan "Membangun Kampung Rasa Kota". Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan yang berbasis wilayah, komprehensif, partisipatif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi pendekatan tersebut adalah menyusun profil dan potensi kampung berbasis kontekstual kampung di kabupaten Mimika.

Dengan adanya basis data kampung yang komprehensif dan selalu diperbarui, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyelenggarakan pembangunan kampung secara lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan. Data ini berfungsi sebagai pijakan teknokratis yang kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi antar-lembaga serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat kampung dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil dan potensi lokal.

Selanjutnya, basis data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media *branding* kampung, sehingga tiap wilayah memiliki ruang untuk menonjolkan keunikan dan potensi khasnya baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan kampung di Kabupaten Mimika tidak hanya sebatas upaya pemerataan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing lokal yang berakar pada identitas masing-masing kampung.

Melalui kegiatan penyusunan profil dan potensi kampung yang terintegrasi dalam basis data tersebut, diharapkan terbangun pijakan yang kokoh menuju terwujudnya kampung yang mandiri, produktif dan berdaya saing. Upaya ini merupakan bagian dari gerakan besar untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai "Gerbang Emas", yakni kabupaten yang sehat, cerdas dan sejahtera, dengan masyarakat serta keluarga yang berkualitas.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini, adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil kampung secara menyeluruh, mencakup aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur;
2. Menggali potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi dan daya saing kampung;
3. Menyediakan data dasar yang akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan kampung;
4. Menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung.

C. Manfaat

Penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah
   a. Penyediaan data akurat dan terpadu berbasis kampung
      Memberikan basis data yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan program pembangunan kampung secara obyektif dan terukur.
   b. Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran
      Memungkinkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat kampung berdasarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
   c. Penguatan tata kelola pemerintahan kampung
      Meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dan distrik dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan transparan berbasis data
   d. Mempercepat pelaksanaan program strategis daerah dan nasional
      Mendukung pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2030 (Gerbang Emas) serta program nasional seperti RIPPP (Papua sehat, cerdas dan produktif) melalui intervensi yang berbasis data dan spasial.
   e. Mendukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis bukti

Menyediakan alat ukur dan indikator yang valid untuk memantau capaian pembangunan kampung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Masyarakat
   a. Peningkatan akses terhadap program dan layanan publik

      Masyarakat akan lebih mudah teridentifikasi dan terakomodasi dalam program pembangunan karena pemerintah memiliki data yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan mereka.

   b. Pemberdayaan berbasis potensi lokal

      Masyarakat akan lebih terdorong mengembangkan potensi kampung (SDA, budaya dan ekonomi lokal) sebagai basis pemberdayaan dan kemandirian.

   c. Partisipasi aktif dalam pembangunan

      Dengan keterlibatan langsung dalam proses pendataan dan pemetaan, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan yang dilakukan.

   d. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung

      Data yang terbuka dan mudah diakses akan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat bagi proses pembangunan dan mendorong kontrol sosial yang sehat.

   e. Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup

      Dengan adanya intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, masyarakat akan memperoleh manfaat nyata seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

BAGIAN II. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Profil Kampung Aparuka dirancang untuk menjamin bahwa data dan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kampung, distrik dan kabupaten. Pendekatan metodologis ini mengacu pada prinsip perencanaan pembangunan berbasis data, partisipasi masyarakat dan sinkronisasi lintas sektor sesuai kerangka perencanaan Pemerintah Kabupaten Mimika.

A. Pendekatan dan Metode Penyusunan

Penyusunan Profil Kampung Aparuka menggunakan metode deskriptif dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi riil kampung, baik dari sisi data objektif maupun dinamika sosial, budaya, kelembagaan, serta potensi sumber daya lokal.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan partisipatif

   Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan aktif aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan ini dilakukan dalam proses pengumpulan, klarifikasi dan pembahasan data agar profil kampung mencerminkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

2. Pendekatan berbasis data primer dan sekunder

   Penyusunan profil kampung memadukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah kampung, distrik dan perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kelengkapan, ketepatan serta konsistensi data.

3. Validasi melalui FGD Kampung

   Seluruh data dan informasi yang dihimpun dilakukan proses validasi melalui FGD tingkat kampung sebagai forum klarifikasi, penyepakatan dan penguatan legitimasi data secara sosial dan administratif.

B. Prinsip Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Aparuka dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Spesifik, yaitu data yang dihimpun mampu menggambarkan indikator pembangunan kampung secara jelas dan terarah sesuai konteks lokal.
2. Dapat dipercaya, yaitu seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur agar mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Dapat diukur, yaitu data disusun berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi, dan satuan ukuran yang merujuk pada standar yang diakui sehingga memungkinkan perbandingan antar waktu.
4. Relevan, yaitu data yang dikumpulkan memiliki nilai guna langsung bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan kampung.
5. Berkelanjutan, yaitu data disusun dengan prinsip pemutakhiran berkala agar Profil Kampung selalu mencerminkan kondisi aktual.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kampung Aparuka meliputi:

1. Data administrasi kampung, antara lain data kependudukan, kelembagaan kampung, sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan dan laporan kampung.
2. Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dari:
   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
   b. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
   c. Data statistik wilayah Kabupaten Mimika dan Distrik Mimika Barat.
3. Observasi lapangan dan wawancara narasumber kunci, yang digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan serta potensi dan permasalahan kampung yang belum sepenuhnya tercakup dalam data administratif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Data sekunder

   Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Aparuka dilaksanakan dengan memanfaatkan data sekunder resmi yang telah tersedia dan terpublikasi resmi, khususnya untuk kebutuhan data dasar kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

   Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Semester- I Tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika**.** Data tersebut digunakan untuk menghimpun informasi mengenai jumlah dan struktur penduduk, karakteristik sosial dasar, tingkat pendidikan, serta indikator kependudukan lainnya yang relevan dengan kebutuhan penyusunan profil kampung.

   Pemanfaatan data sekunder resmi ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dan belum optimalnya validitas data hasil pendataan langsung di lapangan. Untuk itu penggunaan data agregat Dukcapil dipandang sebagai sumber data yang paling andal, terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam mendukung penyusunan Profil Kampung Aparuka.

2. Data primer
   a. Wawancara Mendalam, yang ditujukan kepada informan kunci seperti aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
   b. Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat untuk menggali informasi kualitatif, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan potensi dan kebutuhan prioritas kampung.

Setelah pengumpulan data sekunder dan primer, dilakukan verifikasi silang data sebagai proses pencocokan dan pengecekan data antar sumber, baik antara data lapangan dan data administratif maupun antar OPD, guna memastikan konsistensi dan keandalan data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi Kampung Aparuka.

Data kuantitatif dianalisis melalui tabulasi dan pengelompokan indikator pembangunan sehingga dapat menggambarkan distribusi, kecenderungan, dan proporsi setiap variabel secara terukur. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan penafsiran untuk menangkap makna, dinamika sosial, serta konteks lokal yang melatarbelakangi data numerik.

F. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penyusunan Profil Kampung Aparuka dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan dan validasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan dokumen profil kampung.

Wilayah cakupan penyusunan meliputi wilayah Kampung Aparuka, Distrik Mimika Barat, termasuk kawasan permukiman, wilayah pesisir, serta area aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.



INSTITUT PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA

PETA TITIK LOKASI KAMPUNG APARUKA DISTRIK MIMIKA BARAT KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

U
B T
S

Skala 1:2.000

0 0,02 0,04 0,08 0,12 Km

Keterangan :

X : 136° 24' 7,991" E

Y : 4° 21' 47,745" S

Titik Kampung

Titik Kampung Lain

Kantor Distrik

Datum : WGS 1984
Proyeksi : UTM Zona 54 S
Sistem Kordinat : Geografis dan UTM
Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Inset Peta



Lokasi Pemetaan

BAGIAN III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG

A. Keadaan Wilayah Kampung

1. Sejarah

a. Asal-usul kampung

Kampung Aparuka memiliki sejarah terbentuk yang berawal dari dinamika sosial di Kampung Kawar pada akhir decade 1990-an, ketika terjadi persoalan antara perempuan dan laki-laki yang kemudian mendorong sebagian warga untuk bermigrasi. Pada periode 1997-1999, kelompok ini terlebih dahulu berpindah dan menetap di kampung induk Manuare, sebelum kemudian melanjutkan perpindahan ke lokasi yang sekarang dikenal sebagai Aparuka.

Gagasan pembentukan Aparuka sebagai kampung definitif muncul kuat setelah tahun 2006 melalui peran almarhum Bapak Yoseph Ewata yang memimpin sebagai kepala kampung selama dua periode dengan total masa kepemimpinan sekitar sepuluh tahun. Masa kepemimpinan almarhum berlangsung melewati beberapa periode pemerintahan nasional, mulai dari masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, kemudian berlanjut pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sekitar tahun 2020, sebelum akhirnya estafet kepemimpinan dialihkan kepada Sekretaris Kampung, Bapak Frans Kamawiaya, sebagai Pelaksana Tugas hingga akhir 2023 dan kemudian diteruskan oleh Kepala Kampung definitif yang baru, Bapak Yonas Kenaroke, sejak 2024 sampai sekarang.

Motif pembentukan Kampung Aparuka tidak hanya dilandasi oleh perpindahan penduduk karena konflik sosial, tetapi juga terkait dengan ekspansi marga dan penyesuaian terhadap kondisi alam, termasuk ancaman erosi di lokasi-lokasi sebelumnya. Kampung lama Aparuka kemudian berpindah dari lokasi awal menuju kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kokonarepia, yaitu area tanah hunian dengan banyak pepohonan yang posisinya berhadapan dengan wilayah


Gapura Kampung Aparuka (dok.ippm)

Ituka, sehingga memberi ruang baru bagi pengembangan permukiman dan lahan hidup masyarakat.

Dalam perjalanan sejarahnya, leluhur komunitas Aparuka juga mengalami beberapa tahap perpindahan lintas kampung seperti Imarke, Paripi (Markomia), Wakapo, dan Amar, yang sebagian besar terkait dengan ancaman erosi, dinamika perang, maupun tekanan lingkungan di sekitar kaki Gunung Aparuka. Pola perpindahan berulang ini membentuk jaringan kekerabatan yang tersebar di beberapa kampung pesisir dan pedalaman di Kabupaten Mimika, sekaligus memperkuat identitas kolektif warga Aparuka sebagai komunitas yang terbiasa beradaptasi dengan perubahan ruang hidup dan tekanan alam.

Asal-usul sosial Kampung Aparuka bertumpu pada keberadaan dua suku utama, yaitu Suku Manuare dan Suku Timeri, yang menjadi moyang komunitas di wilayah ini. Dalam tradisi lisan, tanah asal mereka dikenal dengan sebutan Tete Baiya dan Nene Baiya Tua, yang kemudian melahirkan empat garis keturunan marga, yaitu marga Pika, Botare, Ikim Pare, dan Mainako, yang hingga kini masih dijumpai sebagai marga-marga penting di Kampung Aparuka dan Timeri.

Selain itu, garis keturunan lain berkembang melalui pernikahan antara tokoh-tokoh leluhur seperti Nene Manuare dan Tete Paniai bermarga Koto, yang kemudian menurunkan keluarga Aparuka dan Paniai serta memunculkan marga-marga baru seperti Koto, Abuja, dan Badokapa. Marga Badokapa bahkan tercatat telah menyebar hingga ke wilayah Paniai, khususnya di Distrik Tigi Timur dan Tigi Barat, sehingga memperlihatkan bahwa jaringan kekerabatan warga Aparuka terhubung dengan komunitas Mee dan Kamoro yang lebih luas di bagian tengah dan selatan Papua.

b. Struktur sosial awal

Struktur sosial awal Kampung Aparuka tersusun atas jaringan marga, kepemimpinan adat, dan pola hidup yang sangat bergantung pada alam pesisir dan hutan di sekitar wilayah Mimika. Pada fase awal, struktur sosial Kampung Aparuka dibangun di atas dua suku utama, yakni Suku Manuare dan Suku Timeri, yang menjadi moyang komunitas dengan wilayah tanah asal yang dikenal sebagai Tete Baiya dan Nene Baiya Tua. Dari dua suku besar ini kemudian lahir marga-marga perintis seperti Pika, Botare, Ikim Pare, dan Mainako, serta garis keturunan lain seperti Koto, Abuja, dan Badokapa yang menjalin hubungan kekerabatan

melampaui batas kampung hingga ke wilayah Paniai, sehingga jaringan keluarga Aparuka terhubung dengan komunitas Kamoro–Mee yang lebih luas. Dalam tradisi masyarakat Mimika-Kamoro, kelompok marga biasanya terikat dalam satu kesatuan tanah adat atau taparu yang memadukan fungsi sosial dan pengelolaan ruang hidup. Melalui ikatan taparu ini, hubungan antar marga diatur dalam pola kekerabatan yang saling terkait, termasuk aturan perkawinan silang, pembagian hak atas dusun sagu, sungai, dan kawasan berburu, sehingga sejak awal struktur sosial Aparuka telah tertata dalam jaringan fratri dan marga yang saling bergantung satu sama lain.

Kepemimpinan adat di komunitas Kamoro pada dasarnya bertumpu pada figur kepala suku atau ketua taparu yang dihormati karena garis keturunan, pengetahuan adat, dan kemampuannya mengatur penggunaan wilayah ulayat. Di Aparuka, posisi-posisi seperti kepala marga, tetua suku Manuare dan Timeri, serta tokoh adat tertua berperan sebagai rujukan utama dalam menetapkan batas tanah, menyelesaikan sengketa keluarga, dan mengatur pemanfaatan dusun sagu, sungai, serta kawasan pesisir, sementara tokoh agama mulai masuk kemudian melalui pengaruh misi Katolik dan gereja yang memperkuat fungsi moral dan pembinaan sosial. Seiring waktu, struktur kepemimpinan adat ini beriringan dengan kepemimpinan formal kampung, di mana kepala kampung dan perangkatnya berkoordinasi dengan tetua adat untuk menetapkan keputusan penting seperti pemindahan lokasi permukiman, pembukaan lahan baru, atau penerimaan pendatang. Keterpaduan antara kepala kampung, kepala suku, dan tokoh agama membentuk pola kepemimpinan ganda yang khas, di mana urusan pemerintahan, adat, dan keagamaan saling menguatkan dalam menjaga keteraturan sosial di Aparuka.

Pola permukiman tradisional masyarakat Mimika–Kamoro, termasuk leluhur Aparuka, umumnya mengikuti garis sungai, pesisir, dan tepi hutan mangrove sehingga rumah-rumah membentuk deretan linear di sepanjang alur air. Pada masa awal, rumah panggung sederhana didirikan dekat sumber air, dusun sagu, dan jalur perahu, dengan jarak yang memungkinkan warga berpindah antara kampung lama seperti Imarke, Paripi (Markomia), Wakapo, Amar, sampai ke lokasi Aparuka sekarang sebagai respon terhadap ancaman erosi, perang kecil, maupun perubahan kondisi lingkungan. Sistem hidup awal masyarakat Aparuka

bercorak subsisten dengan mengandalkan kombinasi kegiatan berburu di hutan, meramu sagu di dusun-dusun ulayat, menangkap ikan, udang, dan moluska di sungai dan hutan mangrove, serta berkebun sederhana di lahan yang sedikit lebih tinggi dan kering. Pola ini sejalan dengan prinsip tiga S (sagu, sampan, sungai) yang menjadi fokus kebudayaan Kamoro, di mana mobilitas dengan perahu, pengelolaan dusun sagu berbasis marga, dan pemanfaatan hasil perairan membentuk fondasi ekonomi dan identitas sosial masyarakat Aparuka pada periode awal sebelum masuknya pola permukiman lebih menetap dan intervensi pembangunan modern.

c. Perkembangan kampung dari masa ke masa

Perkembangan Kampung Aparuka dari masa ke masa menunjukkan perubahan bertahap dari komunitas pesisir yang hidup subsisten menuju kampung yang semakin terhubung dengan sistem pemerintahan modern, lembaga agama, dan ekonomi pasar.

Seiring dengan pengakuan Aparuka sebagai kampung definitif dan bertambahnya generasi dari marga-marga perintis (Pika, Botare, Ikim Pare, Mainako, Koto, Abuja, Badokapa), jumlah penduduk pelan-pelan meningkat dan membentuk unit-unit keluarga yang lebih menetap di satu lokasi. Pola hidup yang awalnya sangat bergantung pada berburu, meramu sagu, dan menangkap ikan mulai berpadu dengan aktivitas baru seperti sekolah, pelayanan gereja, dan keterlibatan dalam program pemerintah, sehingga nilai-nilai tradisional Kamoro (sagu, sampan, sungai) tetap bertahan namun berdampingan dengan praktik hidup yang lebih modern seperti penggunaan uang tunai, telepon seluler, dan transportasi bermesin. Perubahan budaya juga tampak pada cara generasi muda memandang pendidikan, agama, dan kerja; jika dahulu sebagian besar waktu dihabiskan di hutan, rawa, dan sungai, kini semakin banyak anak dan pemuda yang menghabiskan hari antara sekolah, kegiatan gereja, dan kegiatan ekonomi kecil di kampung. Meski begitu, identitas sebagai orang Kamoro/Mimika Wee tetap kuat melalui bahasa lokal, ritual adat, seni ukir dan pola berbagi pangan yang masih dijaga dalam berbagai perayaan keluarga dan gereja.

Perubahan besar di Aparuka dan kampung-kampung sekitarnya tidak terlepas dari pengaruh misi Katolik yang berpusat di Kokonao sejak 1930-an, ketika para misionaris mulai membuka sekolah, pelayanan kesehatan, dan

kegiatan pastoral di pesisir Mimika. Dari Kokonao, jangkauan misi meluas ke kampung-kampung pesisir Mimika Barat, termasuk wilayah Aparuka, dengan membawa pendidikan dasar, pelayanan kesehatan sederhana, serta penanaman nilai-nilai kekristenan yang kemudian menyatu dengan budaya lokal Kamoro.

Pada masa kolonial dan awal Republik Indonesia, kehadiran pemerintah terutama terlihat dalam bentuk penetapan batas distrik, pembentukan kampung administratif, dan penempatan aparat pemerintahan di Kokonao sebagai pusat distrik Mimika Barat. Setelah Mimika menjadi kabupaten definitif pada awal 2000-an, intervensi pemerintah semakin terasa melalui program Dana Desa, pembangunan infrastruktur dasar, layanan administrasi kependudukan, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang ikut membentuk wajah baru Kampung Aparuka.

Dalam perjalanan sejarahnya, warga Aparuka mengalami beberapa kali perpindahan dan relokasi kampung dari Imarke, Paripi (Markomia), Wakapo, dan Amar menuju lokasi Aparuka sekarang, yang banyak dipengaruhi oleh ancaman erosi, dinamika sosial, serta pertimbangan keamanan dan akses layanan. Perpindahan ke Aparuka dan kemudian pengakuannya sebagai kampung definitif pada pertengahan 2000-an menjadi tonggak penting, karena diikuti dengan pembentukan pemerintahan kampung, masa kepemimpinan almarhum Yoseph Ewata selama sekitar satu dekade, dan pembangunan fasilitas dasar seperti balai kampung, rumah ibadah, sekolah atau akses pendidikan, serta dermaga dan jaringan jalan sederhana yang menghubungkan kampung dengan Kokonao dan kampung-kampung tetangga.

Dalam dua dekade terakhir, berbagai program pemerintah dan mitra, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, program kampung sehat, dukungan perumahan, serta proyek-proyek infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi mulai masuk ke Aparuka, meskipun belum selalu stabil dan merata. Perubahan kepemimpinan dari almarhum Yoseph Ewata kepada Frans Kamawiaya sebagai PLT dan kemudian Yonas Kenaroke sejak 2024 menandai fase baru pengelolaan kampung, di mana Aparuka semakin terlibat dalam jejaring program distrik, kabupaten, dan lembaga seperti gereja maupun lembaga pengembangan masyarakat adat.

Secara ekonomi, kehidupan warga Aparuka awalnya bertumpu hampir sepenuhnya pada pola subsisten: berburu di hutan, meramu dan memangkur sagu,

menangkap ikan dan biota air di sungai serta hutan mangrove, dan sedikit berkebun untuk kebutuhan sendiri. Seiring masuknya uang tunai melalui program-program pemerintah, kerja upahan, dan kontak dengan kota Timika, pola ini bertransformasi menjadi ekonomi campuran di mana rumah tangga menggabungkan kegiatan tradisional dengan perdagangan kecil, menjadi buruh, membuka kios, dan memanfaatkan peluang jasa transportasi air atau jasa lain yang muncul di sekitar kampung.

Keterlibatan warga dalam skema bantuan pemerintah, proyek pembangunan, dan jaringan pasar yang menghubungkan kampung dengan kota mendorong sebagian keluarga mulai mengelola hasil tangkap dan hasil kebun bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk dijual, meskipun skala usahanya masih kecil dan sangat bergantung musim. Di sisi lain, kedekatan Aparuka dengan wilayah operasi tambang dan arus ekonomi Mimika juga menghadirkan tantangan baru berupa perubahan agraria dan tekanan terhadap ruang hidup tradisional, sehingga kampung perlu menata strategi ekonomi yang menjaga keseimbangan antara penguatan ekonomi tunai dan pelestarian basis pangan tradisional berbasis sagu, sungai, dan laut.

d. Nilai dan kearifan lokal

Norma adat di Aparuka mengatur cara hidup warga dalam hubungan kekerabatan, pemanfaatan ruang hidup, serta penyelesaian konflik sehari-hari, dengan rujukan utama pada aturan yang diwariskan leluhur Suku Manuare dan Suku Timeri. Berbagai ritual budaya seperti upacara adat keluarga, pesta panen sagu atau hasil tangkap, dan peringatan leluhur menjadi momen penting untuk meneguhkan identitas kolektif sekaligus mengajarkan nilai hormat kepada alam, sesama, dan Sang Pencipta kepada generasi muda.

Struktur kepemimpinan tradisional tersusun atas tetua suku, kepala marga, dan pemangku adat yang diakui karena garis keturunan, pengetahuan adat, serta kemampuannya menjaga keseimbangan dan kerukunan di antara kelompok marga. Dalam banyak urusan penting, seperti penentuan batas tanah ulayat, izin pemanfaatan dusun sagu atau kawasan tertentu, serta penyelesaian perselisihan dan keputusan akhir biasanya dirumuskan melalui musyawarah adat yang difasilitasi para tetua ini sebelum kemudian dikukuhkan dan dijalankan di tingkat kampung.

Tokoh adat dan agamawan memegang peran sentral dalam perkembangan komunitas Aparuka, karena keduanya menjadi rujukan moral dan sosial yang saling melengkapi. Tokoh adat menjaga kesinambungan tradisi, bahasa, dan pengetahuan lokal, sementara imam, katekis, atau pelayan gereja membina kehidupan rohani, mendorong pendidikan, dan menguatkan nilai kebersamaan melalui kegiatan gerejawi yang rutin. Dalam praktik sehari-hari, banyak keputusan sosial penting—misalnya penanganan konflik keluarga, pengumpulan bantuan untuk warga yang berduka atau sakit, hingga dukungan gotong royong membangun rumah atau fasilitas umum dibicarakan bersama oleh kepala kampung, tetua adat, dan tokoh gereja. Pola kolaborasi ini membuat pembangunan di Aparuka tidak hanya dimaknai sebagai urusan fisik dan administratif, tetapi juga sebagai upaya memperkuat keutuhan komunitas dan martabat orang asli setempat.

Pengelolaan tanah ulayat di Aparuka mengikuti prinsip bahwa tanah, hutan, sungai, dan dusun sagu merupakan warisan leluhur yang dijaga oleh marga-marga tertentu, bukan milik individu semata. Batas-batas ulayat biasanya mengikuti tanda-tanda alam seperti alur sungai, hamparan hutan, dan lokasi dusun sagu, sementara hak pakai bagi marga lain atau pendatang diatur melalui kesepakatan adat, sehingga pemanfaatan ruang hidup tetap menghormati hak asal-usul setiap kelompok. Kearifan pengelolaan sungai dan hutan tampak dalam praktik mengambil hasil secara selektif, memberi waktu pemulihan pada lokasi tangkap atau dusun sagu, dan menjaga zona tertentu agar tidak dieksploitasi berlebihan, karena dipandang sebagai “tabungan hidup” bagi generasi berikut. Di sisi lain, solidaritas sosial diwujudkan melalui gotong royong (kerja bakti) dalam membangun rumah, memperbaiki jalan dan dermaga, menyiapkan acara adat atau gereja, maupun membantu keluarga yang sedang mengalami duka, sehingga rasa “satu kampung, satu keluarga besar” tetap terpelihara meskipun kampung terus bergerak mengikuti arus perubahan zaman.

e. Identitas kampung saat ini

Identitas Kampung Aparuka saat ini mencerminkan perpaduan antara budaya Kamoro/Mimika Wee yang kuat dengan pengaruh pendidikan, gereja, dan program pembangunan modern. Masyarakat Aparuka termasuk dalam rumpun Kamoro/Mimika Wee, sehingga bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa

Kamoro (Mimika Wee) di samping bahasa Indonesia yang semakin dominan di sekolah dan urusan pemerintahan. Ekspresi seni budaya hidup melalui tarian dan nyanyian tradisional Kamoro seperti tari Seka dan berbagai tarian pesta mencari makan yang diiringi tifa, serta seni ukir dan anyaman yang sarat simbol hubungan manusia–alam. Dalam hal makanan, identitas kuliner sangat kuat pada sagu sebagai makanan pokok, yang diolah menjadi papeda atau olahan sagu lain dan biasanya disajikan dengan ikan atau hasil laut sebagai sumber lauk utama. Simbol budaya Kamoro seperti penggunaan rumbai-rumbai *(tapena),* hiasan tubuh dengan warna putih, motif ukiran kayu, dan ritual adat tertentu masih tampak dalam perayaan adat, kegiatan gereja besar, maupun perayaan budaya di tingkat distrik dan kabupaten.

Secara formal mungkin belum terdapat motto kampung yang tertulis dan dikenal luas seperti di kota-kota besar, namun semangat dasar masyarakat Aparuka sejalan dengan nilai Kamoro/Mimika Wee yang menekankan hidup yang menghormati alam, sesama, dan Tuhan. Nilai inti tersebut tercermin dalam cara warga menjaga dusun sagu, membagi hasil tangkap, serta memaknai pembangunan sebagai jalan untuk membuat anak cucu "lebih maju tanpa meninggalkan adat dan tanah leluhur". Dalam berbagai kesempatan budaya Kamoro di Mimika, muncul juga narasi identitas baru "Mimika Wee" yang menekankan harapan agar orang Kamoro bangkit, bergerak, dan maju dalam pendidikan, ekonomi, dan pelayanan gereja, yang secara substantif juga mewarnai cara warga Aparuka memandang masa depan kampung.

Arah perkembangan terbaru Kampung Aparuka ditandai oleh semakin kuatnya kaitan dengan layanan pendidikan, gereja, program kesehatan, dan berbagai intervensi pemerintah yang mendorong kampung keluar dari pola hidup yang sepenuhnya subsisten. Generasi muda semakin banyak terlibat dalam sekolah, kegiatan gereja, kelompok seni budaya, dan program-program kampung, sementara orang tua tetap memelihara kegiatan tradisional seperti sagu, perikanan, dan berburu, sehingga karakter kampung menjadi campuran antara tradisional dan modern. Interaksi dengan kota Timika, lembaga gereja, YPMAK, dan program kabupaten juga membentuk pola baru, misalnya meningkatnya penggunaan uang tunai, telepon seluler, dan akses digital, di satu sisi, dan di sisi lain muncul kesadaran untuk menjaga hutan mangrove, dusun sagu, dan wilayah ulayat dari

tekanan eksternal. Dengan demikian, identitas Aparuka hari ini adalah kampung pesisir Kamoro yang sedang bergerak menuju kampung yang lebih maju dan terhubung, namun tetap berupaya mempertahankan bahasa, ritual, dan tanah adat sebagai penyangga utama jati diri komunitas.

2. Keadaan Wilayah

a. Letak geografis

Kampung Aparuka terletak di wilayah administratif Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai salah satu kampung pesisir yang berada di jalur antara kawasan rawa–sungai dan pantai selatan Mimika. Secara lebih luas, wilayah ini termasuk dalam kawasan pesisir selatan Papua yang menghadap ke Laut Arafura dan terhubung dengan pusat pelayanan distrik di Kokonao serta kampung-kampung lain seperti Mimika, Apuri, dan Kiyura melalui jalur sungai dan laut.

Berdasarkan konteks wilayah distrik, posisi geografis Mimika Barat berada kira-kira dalam rentang koordinat kabupaten 134°31’–138°31’ BT dan 4°60’–5°18’ LS, sehingga Aparuka ikut berada di zona pesisir dataran rendah dengan banyak alur sungai dan rawa. Secara administratif, batas kampung Aparuka beririsan dengan kampung-kampung tetangga dalam distrik yang sama, dengan bagian utara umumnya berbatasan dengan kawasan rawa dan hutan ulayat, bagian selatan mengarah ke perairan pesisir dan muara, bagian timur bersinggungan dengan wilayah kampung lain di Mimika Barat, dan bagian barat berhubungan dengan hamparan hutan, rawa, dan potensi perairan menuju kampung-kampung di sekitar Amar-Manuare.

b. Luas wilayah dan pembagian zona

Dalam konteks Distrik Mimika Barat, Aparuka dikenal sebagai salah satu kampung dengan wilayah terluas, yang menyumbang sekitar 38–39 persen dari total luas distrik sehingga mencakup areal hutan, rawa, dan perairan yang cukup besar di luar kawasan permukiman. Skala wilayah yang luas ini membuat pemanfaatan ruang kampung tersebar dalam beberapa zona utama: zona permukiman yang relatif padat di titik-titik hunian, zona kebun dan ladang kecil di dataran yang sedikit lebih tinggi, zona hutan dan dusun sagu di bagian dalam, serta zona sungai, rawa, dan perairan yang menjadi ruang utama aktivitas menangkap ikan, udang, dan hasil laut lainnya.

Penggunaan lahan di Aparuka dapat dibedakan atas kawasan perumahan warga yang umumnya berupa rumah panggung, lahan kebun campuran di sekitar permukiman, serta area fasilitas umum seperti balai kampung, tempat ibadah, lapangan, dan dermaga yang menjadi titik berkumpul masyarakat. Sebagian besar wilayah kampung tetap berupa tanah ulayat dalam bentuk hutan, rawa, dan dusun sagu yang dikelola berdasarkan marga, sementara penggunaan lahan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lain banyak terhubung dengan pusat distrik Kokonao dan kampung tetangga melalui jaringan pelayanan wilayah.

c. Kondisi topografi dan geomorfologi

Topografi Kampung Aparuka didominasi oleh dataran rendah pesisir dengan bentang rawa, sungai, dan hutan mangrove yang luas, diselingi dataran yang sedikit lebih tinggi yang dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman dan kebun. Secara geomorfologi, wilayah ini termasuk dalam zona dataran aluvial pesisir selatan Mimika yang terbentuk dari endapan sungai besar dan kecil, sehingga banyak memiliki tanah lembek, genangan musiman, serta jalur air yang memanjang dari pedalaman ke laut.



Topografi Kampung Aparuka (dok.ippm)

Kemiringan lahan di sebagian besar wilayah Aparuka relatif datar hingga landai dengan ketinggian sangat rendah dari permukaan laut, sehingga sangat dipengaruhi pasang surut, curah hujan tinggi, dan dinamika sungai. Kondisi ini menjadikan kampung rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir genangan, banjir rob, dan gelombang pasang, serta abrasi di bagian tepian sungai atau pantai yang berhadapan langsung dengan arus dan angin kuat, sementara risiko longsor relatif kecil karena minimnya daerah perbukitan curam.

d. Iklim dan kondisi alam

Kampung Aparuka terletak di wilayah pesisir dengan karakter iklim tropis basah hingga sangat basah, dengan pola musim yang serupa dengan kampung-kampung lain di Distrik Mimika Barat. Sepanjang tahun, kawasan ini pada dasarnya hanya mengalami dua musim, yaitu musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar Januari hingga Mei, dan musim hujan yang mendominasi

bulan Juni hingga Desember. Kondisi kelembapan yang tinggi serta curah hujan yang relatif merata membuat lingkungan senantiasa lembap dan menunjang tumbuhnya beragam ekosistem khas pesisir Papua. Secara umum, wilayah pesisir Mimika memiliki rata-rata curah hujan sekitar ±500 mm per bulan dengan suhu udara yang cenderung stabil di kisaran 22-30°C, sehingga menjadikan Kampung Aparuka sebagai kawasan dengan produktivitas ekologis yang tinggi, baik di darat maupun di perairan.

Musim-musim ekstrem di Kampung Aparuka sangat dipengaruhi oleh karakter ekologis pesisir dan keberadaan sungai-sungai besar yang menjadi tulang punggung kehidupan warga. Pada puncak musim hujan, kampung ini kerap dilanda banjir genangan, terutama di kawasan rawa, permukiman yang letaknya rendah, dan area yang dekat dengan alur Sungai Mimika maupun Sungai Kapare. Genangan air tersebut sering diperburuk oleh kombinasi pasang tinggi dan hembusan angin kuat yang lazim terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun. Di masa peralihan musim, hembusan angin dari arah laut dapat menjadi cukup kencang sehingga mempengaruhi aktivitas melaut dan mobilitas warga yang mengandalkan transportasi sungai. Pola cuaca ekstrem seperti ini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Aparuka dan membentuk cara mereka menata permukiman serta mengatur pemanfaatan sumber daya alam.

Iklim yang sangat lembap dan basah tersebut secara langsung menopang kekayaan sumber daya alam yang menjadi ciri khas Kampung Aparuka. Hutan-hutan sagu tumbuh lebat di kawasan rawa dan menyediakan bahan pangan utama sekaligus menjadi penopang penting budaya lokal. Hamparan mangrove yang luas berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi, lokasi utama untuk mencari kepiting bakau, kerang, dan tambelo, serta sebagai ekosistem kunci bagi keberlanjutan perikanan di wilayah ini. Aliran sungai besar di sekitar kampung bukan hanya berperan sebagai jalur transportasi tradisional, tetapi juga sebagai sumber perikanan air tawar yang melimpah, mulai dari ikan, udang, hingga berbagai biota sungai lainnya. Perpaduan antara iklim basah, curah hujan tinggi, dan ekosistem pesisir yang relatif lengkap menjadikan Kampung Aparuka sebagai wilayah dengan ketersediaan sumber daya alam yang kaya dan sangat menentukan keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Sumber daya alam utama di Kampung Aparuka sangat ditentukan oleh karakter pesisir–rawa dengan dominasi hutan sagu, mangrove, sungai besar, dan perikanan yang kaya. Hutan sagu membentang di kawasan rawa dan dataran rendah di sekitar kampung, menjadi lumbung pangan utama sekaligus penopang budaya karena sagu tidak hanya dikonsumsi sehari-hari, tetapi juga hadir dalam berbagai ritus adat dan acara gerejawi. Di sisi pesisir, hutan mangrove tumbuh rapat mengikuti alur sungai dan tepian laut, berfungsi sebagai pelindung alami terhadap abrasi dan badai sekaligus menjadi habitat penting bagi kepiting bakau, kerang, tambelo, dan berbagai biota lain yang menjadi sumber protein dan penghidupan warga.

Keberadaan sungai-sungai besar di sekitar Aparuka, yang menghubungkan kampung dengan wilayah pedalaman dan pesisir, menjadikan jalur air sebagai nadi utama transportasi sekaligus ruang produksi pangan. Perikanan sungai dan pesisir meliputi ikan, udang, dan aneka hasil laut lainnya menjadi mata pencaharian pokok bagi banyak keluarga, baik untuk konsumsi maupun dijual dalam skala kecil, sehingga kombinasi hutan sagu, mangrove, sungai, dan perairan menjadikan wilayah ini kaya sumber daya alam yang sangat menentukan ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga.

B. Keadaan Perumahan

1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah

Keadaan perumahan di Kampung Aparuka merefleksikan karakter kampung pesisir–rawa dengan dominasi rumah panggung sederhana, akses dasar yang terbatas, serta kerentanan tinggi terhadap banjir dan genangan. Sebagian besar rumah di Kampung Aparuka tergolong non permanen hingga semi permanen, dengan bentuk rumah panggung kayu yang menyesuaikan kondisi tanah rawa dan dataran rendah pesisir; hanya sebagian kecil rumah yang sudah menggunakan konstruksi lebih permanen dengan dinding tembok dan lantai semen. Bangunan tradisional dan sederhana ini umumnya dibangun bertahap sesuai kemampuan



Rumah Layak Huni Kampung Aparuka (dok.ippm)

ekonomi keluarga, sehingga kualitas struktur dan kerapian bangunan sangat bervariasi antara satu rumah dengan rumah lainnya.

Bahan bangunan yang dipakai didominasi oleh kayu dan papan untuk dinding, atap seng atau asbes pada rumah yang lebih baru, sementara pada rumah yang lebih tua atau sederhana masih dijumpai penggunaan atap rumbia atau bahan lokal lainnya; untuk lantai, kombinasi lantai papan (pada rumah panggung) dan lantai semen (pada rumah semi permanen dan bantuan) menjadi pola umum. Dari sisi kelayakan, cukup banyak rumah yang berada dalam kategori rusak ringan hingga rusak sedang (bocor, kayu lapuk, tiang miring), bahkan sebagian termasuk tidak layak huni karena lantai dan dinding rapuh, ventilasi buruk, atau terlalu rendah terhadap muka air, sementara rumah yang benar-benar memenuhi standar layak huni masih terbatas.


Rumah sederhana di Aparuka (dok.ippm)


Pembangunan Rumah di Aparuka (dok.ippm)

Kepadatan hunian di pusat kampung cenderung tinggi, dengan jarak rumah yang rapat dan satu bangunan kadang dihuni lebih dari satu KK, terutama pada rumah keluarga besar; di zona yang lebih pinggir, rumah sedikit lebih renggang mengikuti ketersediaan lahan kering. Secara umum, kepadatan rumah per hektar di inti kampung relatif tinggi untuk ukuran kampung pesisir, sedangkan di wilayah rawa dan lahan ulayat jarak antar rumah jauh lebih renggang.

2. Pola Permukiman

Permukiman di Aparuka tidak sepenuhnya terpusat pada satu titik, melainkan membentuk beberapa kantong hunian yang menyebar mengikuti garis pesisir, alur sungai, dan jalur jalan kampung. Pola ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi tanah dan kebutuhan akses ke sungai, dermaga, serta ruang ekonomi seperti lokasi perikanan dan kebun.

Sebagian besar rumah mengikuti alur sungai dan jalur jalan utama kampung yang menghubungkan rumah warga dengan balai kampung, gereja, lapangan, dan dermaga; di beberapa bagian, permukiman memanjang sejajar garis pantai atau tepi rawa yang masih dapat dijadikan tempat berdiri rumah panggung. Pembagian dusun/RT atau zona permukiman umumnya mengikuti kantong-kantong hunian tersebut, sehingga setiap RT memiliki karakter campuran antara rumah dekat air dan rumah di lahan yang sedikit lebih tinggi.



Pola pemukiman dalam kampung Aparuka (dok.ippm)

Jarak antar rumah di inti kampung umumnya dekat sehingga membentuk deretan rumah yang saling berhadapan atau berdampingan, dengan hubungan langsung ke fasilitas umum melalui jalan tanah, atau jalan yang sudah diperkeras (cor beton) di ruas jalan utama kampung. Kedekatan ini memudahkan penarikan jaringan listrik dan distribusi air bersih (jika tersedia), namun juga membuat risiko kebakaran, penyebaran penyakit, dan dampak banjir/rob menjadi lebih luas sekaligus.

3. Kepemilikan rumah

Mayoritas rumah di Kampung Aparuka dimiliki secara pribadi oleh warga, dibangun di atas tanah ulayat keluarga atau tanah kampung yang diatur melalui kesepakatan adat dan keluarga. Di samping itu, terdapat juga keluarga yang menumpang di rumah kerabat (anak menetap di rumah orang tua/mertua, saudara tinggal sementara) sehingga status kepemilikan rumah secara sosial sering kali kolektif dalam satu marga atau keluarga besar.

Sebagian rumah merupakan hasil program bantuan pemerintah seperti bantuan rumah swadaya/BSPS, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), atau dukungan dana desa dan program keagamaan yang membantu perbaikan atap, lantai, dan dinding. Meski skala bantuan ini belum mencakup semua kebutuhan, keberadaannya mulai terlihat dari munculnya rumah dengan material lebih permanen dan fasad yang relatif seragam pada blok-blok tertentu.

Rumah adat atau rumah komunal dalam bentuk balai kampung dan ruang berkumpul tradisional berfungsi sebagai tempat musyawarah, pertemuan adat, dan

kegiatan sosial-keagamaan. Bangunan seperti balai kampung menjadi simbol kepemilikan kolektif yang mewakili seluruh marga dan warga kampung, meskipun bentuk rumah adat tradisional dalam arti arsitektur lama sudah banyak bertransformasi mengikuti bahan dan gaya bangunan modern.

4. **Luas bangunan dan jumlah kamar**

Luas bangunan rumah di Aparuka pada umumnya relatif kecil hingga sedang, menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga serta ketersediaan lahan yang aman dari genangan. Banyak rumah memiliki luas lantai sekitar ukuran sederhana (misalnya tipe 36-60 m² secara fungsional), sedangkan luas lahannya bisa lebih besar namun tidak seluruhnya dimanfaatkan karena kondisi tanah yang lembek atau tergenang.

Pembagian ruang di dalam rumah biasanya minimal terdiri atas satu ruang tamu atau ruang serbaguna, satu hingga dua kamar tidur, dan dapur sederhana yang terkadang menyatu dengan ruang makan atau berada di bagian belakang rumah. Kamar mandi dan jamban kadang berada di dalam rumah untuk bangunan yang lebih permanen, tetapi pada rumah panggung tradisional tidak jarang fasilitas ini terpisah di belakang atau samping rumah, bahkan ada yang masih menggunakan jamban sederhana dekat sungai atau rawa.

5. **Ketersediaan fasilitas dasar rumah tangga**

Akses air bersih di Kampung Aparuka umumnya berasal dari kombinasi sumber: sebagian rumah memanfaatkan jaringan air gravitasi atau sistem penyaluran setempat (misalnya tandon atau pipa lokal), sementara lainnya masih bergantung pada air hujan yang ditampung, air sumur dangkal, atau air sungai yang diolah secara sederhana. Pada musim kemarau atau saat kualitas air sungai menurun, keluarga bisa mengalami kesulitan air bersih dan harus berbagi sumber dengan tetangga atau fasilitas umum.

Sistem sanitasi rumah tangga bervariasi; sebagian keluarga sudah memiliki jamban keluarga dengan septic tank sederhana, terutama yang mendapat program pembangunan jamban sehat, namun tidak sedikit yang masih menggunakan jamban tidak sehat (langsung ke rawa/sungai) atau praktik buang air di sungai karena keterbatasan ruang, biaya dan kondisi tanah. Situasi ini membuat kampung menghadapi risiko pencemaran lingkungan dan penyakit berbasis air, terutama di kawasan padat permukiman.

Untuk penerangan, sebagian besar rumah di pusat kampung sudah terhubung dengan jaringan listrik (skema listrik kampung), sedangkan rumah di pinggiran atau lokasi yang lebih sulit dijangkau kadang masih mengandalkan genset bersama atau tidak memiliki listrik permanen. Penggunaan lampu tenaga surya skala kecil mulai muncul sebagai solusi alternatif, tetapi belum mencakup semua rumah tangga, sehingga masih ada keluarga yang hanya mengandalkan lampu minyak atau penerangan terbatas pada malam hari.

Pengelolaan sampah rumah tangga umumnya masih dilakukan secara sederhana: banyak keluarga membakar sampah di halaman atau membuangnya di sudut-sudut lahan kosong, tepi rawa, bahkan mendekati sungai karena belum tersedianya sistem pengangkutan sampah dan TPS yang terkelola. Kondisi ini memunculkan tumpukan sampah campuran (organik dan plastik) di beberapa titik, yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu estetika kampung. Drainase di sekitar rumah dan jalur jalan masih terbatas; pada beberapa ruas sudah ada saluran sederhana, tetapi di banyak tempat air menggenang lama setelah hujan sehingga meningkatkan risiko banjir kecil, becek dan munculnya vektor penyakit.

6. Kondisi lingkungan permukiman

Kebersihan lingkungan sekitar rumah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga dan ketersediaan infrastruktur; sebagian warga rutin membersihkan pekarangan dan melakukan kerja bakti, namun pola pembuangan sampah dan limbah yang masih terbuka membuat kualitas kebersihan secara umum belum merata. Di zona yang lebih padat, tumpukan barang bekas, sampah dan genangan air masih kerap ditemukan di sela-sela rumah atau di bawah rumah panggung.

Akses jalan menuju rumah terdiri atas kombinasi jalan tanah, dan beberapa ruas cor beton, terutama di sekitar pusat kampung dan jalur menuju balai kampung. Pada musim hujan, jalan tanah dan beberapa bagian yang tidak diperkeras menjadi licin dan becek, sehingga menyulitkan pergerakan, terutama bagi anak sekolah, lansia, sementara itu ruas yang sudah diperkeras relatif lebih nyaman dilalui.

Lingkungan permukiman memiliki risiko bencana yang menonjol berupa banjir genangan, banjir rob, dan abrasi di titik-titik yang dekat dengan sungai atau pesisir, sementara risiko longsor relatif kecil karena tidak ada lereng curam. Selain banjir, ancaman pohon tumbang saat angin kencang dan badai juga perlu

diwaspadai, terutama di rumah-rumah yang berada dekat tegakan pohon besar tanpa penataan yang baik. Halaman dan pekarangan umumnya sempit di pusat kampung, tetapi lebih luas di pinggiran, dengan pagar sederhana (kayu, bambu, atau kawat) maupun batas lahan alami seperti parit, tanaman, dan tiang kayu yang menandai pemisahan antar pekarangan keluarga.

7. Masalah utama dan kebutuhan perumahan

Masalah utama perumahan di Kampung Aparuka adalah masih banyaknya rumah yang tidak layak huni (RTLH), baik karena struktur kayu yang sudah lapuk, atap bocor, lantai rusak, maupun posisi bangunan yang terlalu rendah dan sering tergenang. Kondisi ini berdampak pada kesehatan penghuni serta kenyamanan hidup, terutama bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap penyakit.

Kelebihan penghuni per rumah (*overcrowding*) juga menjadi persoalan, ketika satu unit rumah dihuni beberapa KK atau banyak anggota keluarga, sehingga ruang tidur, privasi, dan sirkulasi udara menjadi sangat terbatas. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan kemampuan membangun rumah baru dan keterikatan keluarga besar dalam satu halaman atau rumah panggung.

Minimnya akses air bersih dan sanitasi layak memperburuk kualitas hidup, karena sebagian warga masih mengandalkan sungai sebagai sumber air sekaligus tempat pembuangan, dan tidak semua rumah memiliki jamban sehat. Selain itu, banyak rumah dibangun di lokasi yang rawan banjir atau abrasi, sehingga setiap musim hujan atau pasang besar warga harus menghadapi ancaman kerusakan rumah dan gangguan aktivitas harian. Bantuan perumahan dari pemerintah, dana desa, atau program lain memang sudah ada tetapi belum mencukupi untuk menjawab keseluruhan kebutuhan, baik dari sisi jumlah rumah yang dibantu maupun kualitas perbaikan (misalnya tanpa menuntaskan masalah sanitasi, air bersih, dan elevasi bangunan).

Ke depan, kebutuhan utama perumahan di Aparuka mencakup: peningkatan jumlah dan kualitas rumah layak huni, penataan permukiman di zona aman banjir/abrasi, penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai, serta program rehabilitasi rumah berbasis partisipasi warga dan dukungan marga/keluarga besar agar penataan ruang hidup lebih tertib dan sehat.

C. Kependudukan

1. Suku-suku di Kampung

a. Suku/marga asli

Penduduk asli Kampung Aparuka berasal dari rumpun Kamoro/Mimika Wee dengan dua suku/moyang utama, yakni Suku Manuare dan Suku Timeri, yang kemudian menurunkan marga-marga seperti Pika, Botare, Ikim Pare, Mainako, Koto, Abuja, dan Badokapa. Dalam struktur sosial Kamoro, kelompok marga ini berhimpun dalam satuan taparu (tanah/marga besar) yang mengatur hubungan kekerabatan, hak ulayat, dan kewajiban sosial antarkelompok.

Sistem kekerabatan masyarakat Mimika–Kamoro bersifat fratri bilineal dengan penekanan kuat pada garis leluhur perempuan dalam pembentukan taparu, namun dalam praktik sehari-hari pola hak atas tanah dan peran sosial banyak dijalankan secara patrilineal melalui marga ayah. Sebaran marga di kampung cenderung membentuk kantong-kantong permukiman, tersebar pada 1 RW dan 5 RT didominasi oleh satu atau dua marga tertentu yang memiliki tanah ulayat.

b. Suku pendatang

Selain penduduk asli Kamoro, Aparuka juga dihuni oleh sejumlah keluarga pendatang dari berbagai daerah di Papua dan luar Papua, seperti Kei dan Tanimbar dari Maluku, serta suku-suku Nusantara lain (misalnya Bugis, Jawa, atau etnis pesisir lain) yang sudah lama menetap di wilayah Mimika. Banyak di antara mereka datang sebagai pedagang, guru, tenaga kesehatan, tukang, atau pelaku usaha kecil, dan kemudian menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan maupun kedekatan sosial dengan keluarga asli Aparuka.

Sebagian kelompok pendatang telah tinggal puluhan tahun dan membesarkan generasi kedua/ketiga di Mimika, sehingga integrasi mereka berlangsung melalui partisipasi dalam kegiatan gereja, sekolah, kerja bakti, dan aktivitas sosial kampung lainnya. Walaupun tidak memiliki hak ulayat atas tanah adat Kamoro, mereka biasanya memperoleh hak pakai lahan tempat tinggal melalui kesepakatan dengan marga pemilik tanah dan pemerintah kampung.

c. Peran sosial masing-masing kelompok etnis

Dalam pemerintahan kampung, posisi-posisi kunci seperti kepala kampung, kepala marga, dan tetua adat umumnya dipegang oleh orang asli Kamoro/Mimika Wee sebagai pemilik tanah dan pewaris struktur adat. Sementara itu, warga

pendatang banyak berperan di bidang ekonomi (perdagangan, dan jasa transportasi), pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kegiatan gereja dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam ranah keagamaan dan sosial, baik warga asli maupun pendatang terlibat bersama sebagai pengurus lingkungan gereja, panitia perayaan hari besar, kelompok doa, kelompok koor, serta organisasi pemuda dan perempuan. Pola ini menciptakan pembagian peran yang relatif seimbang adat dan ulayat tetap dikelola oleh Kamoro, sementara dinamika ekonomi dan pelayanan banyak diperkuat kontribusi lintas etnis.

d. Relasi sosial

Relasi sosial antar suku di Aparuka pada umumnya ditandai dengan suasana saling menghormati, gotong royong, dan rasa "satu kampung" yang kuat, meskipun latar belakang etnis berbeda. Gotong royong terlihat jelas dalam kegiatan membangun rumah, memperbaiki jalan dan dermaga, menyiapkan acara adat atau gereja, serta ketika keluarga mengalami duka atau musibah, di mana masyarakat lintas marga dan suku bergandeng tangan memberikan dukungan.

Pola interaksi sehari-hari berlangsung melalui pergaulan di sekolah, gereja, dermaga, pasar kecil, dan lapangan, yang menjadi ruang pertemuan utama warga asli dan pendatang. Meski sesekali muncul gesekan kecil, terutama terkait minuman keras atau persoalan pribadi, secara umum relasi sosial diikat oleh nilai-nilai kekeluargaan, adat, dan agama yang mendorong penyelesaian damai melalui tokoh adat dan tokoh agama.

2. Nilai dan Kearifan Lokal

a. Norma Adat dan Sistem Sosial

Aturan adat di Kampung Aparuka mengatur banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari tata krama dalam keluarga dan antarmarga, cara memanfaatkan tanah ulayat, hingga mekanisme penyelesaian konflik. Pembagian lahan ulayat diatur berdasarkan taparu dan marga pemilik, sementara hak pakai untuk keperluan permukiman, kebun, atau fasilitas umum dibicarakan melalui musyawarah antara pemilik adat, kepala kampung dan tokoh terkait.

Struktur lembaga adat tersusun atas kepala marga, tetua taparu, tua adat dan forum musyawarah adat yang dalam konteks Papua kadang disejajarkan dengan peran ondoafi, meski istilah lokal Kamoro berbeda. Lembaga-lembaga ini

berperan dalam menentukan sikap adat atas persoalan penting, seperti pelanggaran norma, perselisihan antar kelompok dan keputusan penggunaan ruang hidup, serta menjadi mitra pemerintah kampung dalam menjaga ketertiban sosial.

b. Ritual, tradisi dan upacara

Ritual dan tradisi di Aparuka merupakan bagian dari warisan budaya Kamoro/Mimika Wee yang berpadu dengan praktik kekristenan yang kuat di wilayah Mimika. Berbagai upacara adat seperti pesta sagu, pernikahan adat, penyambutan tamu, hingga ritus terkait kelahiran dan kematian masih dijalankan dalam bentuk yang telah menyesuaikan dengan ajaran gereja, misalnya dengan doa bersama, ibadah syukur, dan perjamuan makan adat.

Musik dan tarian tradisional seperti tari Seka, tarian pesta sagu, serta nyanyian adat menjadi ekspresi budaya yang kerap tampil dalam perayaan gereja, festival budaya, dan kegiatan kampung. Simbol-simbol budaya Kamoro seperti ukiran kayu, topeng, motif tubuh, dan penggunaan rumbai-rumbai *(tapena)* masih dihidupkan, terutama dalam konteks ritual walau hadapi tantangan modernisasi dan berkurangnya generasi muda yang menguasai keterampilan tersebut.

c. Pengetahuan lokal

Masyarakat Aparuka memiliki pengetahuan lokal yang kuat tentang pengelolaan hutan, sungai, sagu, dan perikanan yang didasarkan pada prinsip hidup selaras dengan alam. Mereka memahami siklus pasang surut, musim ikan, masa panen sagu, serta lokasi-lokasi yang dianggap boleh diambil hasilnya dan yang harus “diistirahatkan”, sehingga eksploitasi sumber daya tidak melampaui kapasitas alam untuk pulih.

Kearifan lokal juga tampak dalam manajemen risiko bencana: pengetahuan turun-temurun tentang tanda-tanda banjir besar, angin kencang, atau gelombang pasang mempengaruhi cara warga memilih lokasi rumah, menata barang, dan mengatur jadwal melaut. Selain itu, terdapat pengetahuan tentang obat-obatan tradisional dari tanaman hutan, keterampilan navigasi sungai dan pesisir menggunakan tanda alam, serta teknik kerajinan seperti ukiran, anyaman, dan pembuatan perahu yang menjadi bagian penting identitas Kamoro.

d. Nilai-nilai dasar masyarakat

Nilai-nilai dasar yang dipegang masyarakat Aparuka mencakup solidaritas, gotong royong, dan kerjasama antar marga yang kuat, yang tercermin dalam

kebiasaan berbagi hasil tangkap, saling membantu dalam acara adat dan gereja, serta kerja bakti rutin di kampung. Nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap tokoh adat, tetua, dan pemimpin gereja dijaga melalui sapaan, tata krama, dan kebiasaan meminta nasihat dalam pengambilan keputusan penting.

Bahasa lokal yang digunakan adalah bahasa Kamoro/Mimika Wee, yang masih dipakai dalam interaksi sehari-hari, terutama di antara orang tua dan sesama warga asli, sementara bahasa Indonesia lebih dominan di sekolah, gereja, dan urusan resmi. Tingkat pelestarian bahasa Kamoro cukup menghadapi tantangan karena generasi muda semakin sering menggunakan bahasa Indonesia, namun upaya mempertahankannya terus dilakukan melalui ritual adat, doa-doa tertentu, cerita rakyat, serta lagu dan tarian tradisional yang diajarkan di lingkungan keluarga dan gereja.

e. Bahasa lokal

Bahasa yang digunakan masyarakat Kampung Aparuka dalam keseharian adalah bahasa Kamoro/Mimika Wee dan bahasa Indonesia. Bahasa Kamoro umumnya dipakai dalam interaksi di dalam keluarga, antar warga asli, serta dalam konteks adat, sementara bahasa Indonesia lebih dominan di sekolah, gereja, dan urusan resmi.

Dari sisi pelestarian, penggunaan bahasa Kamoro masih cukup kuat di kalangan orang tua dan generasi dewasa, tetapi mulai melemah di kalangan anak-anak dan remaja yang lebih sering bercakap dalam bahasa Indonesia, terutama karena pengaruh pendidikan formal, media, dan pergaulan lintas etnis. Upaya menjaga bahasa lokal dilakukan melalui penggunaan bahasa Kamoro dalam ritual adat, doa atau nyanyian tertentu di gereja, penceritaan dongeng dan sejarah kampung oleh tetua, serta pengenalan kosakata lokal dalam kegiatan budaya di tingkat kampung dan distrik.

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Mayoritas warga Aparuka berasal dari Suku Kamoro/Mimika Wee sebagai penduduk asli pemilik ulayat, sementara sebagian kecil lainnya merupakan pendatang dari berbagai daerah yang sudah menetap dan menjadi bagian dari komunitas kampung. Komposisi ini membuat wajah sosial Aparuka tetap

didominasi identitas Kamoro, tetapi sekaligus terbuka terhadap interaksi budaya dengan kelompok etnis lain yang tinggal di kampung.

Jumlah penduduk Kampung Aparuka sesuai laporan data agregat semester-1 Dinas Dukcapil Tahun 2025 tercatat sebanyak 209 jiwa yang tersebar dalam 37 kepala keluarga (KK) dari keluarga inti dan keluarga besar di wilayah permukiman pesisir dan rawa. Komposisi penduduk terdiri atas laki-laki 116 jiwa (55,50%) dan perempuan 93 jiwa (44,50%), sehingga secara keseluruhan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Namun fakta menarik lain bahwa berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Dinas Dukcapil Mimika Tahun 2025 jumlah penduduk kampung Atapo yang telah terekam administrasi kependudukan e-KTP 76,36%, KTA 74,75%, KK 100% dan Akta Kelahiran 100%. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kampung Atapo telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga berpeluang mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan pemerintah.

Namun masih tingginya jumlah penduduk lebih 20% yang belum melakukan perekaman terutama e-KTP dan KTA mengindikasikan adanya kendala mobilitas, tingkat kesadaran, atau keterbatasan akses terhadap layanan perekaman di kampung. Untuk itu diperlukan strategi yang lebih proaktif, kolaboratif dan sensitif konteks lokal agar seluruh penduduk dapat tercatat secara sah sebagai bagian dari sistem kependudukan negara.

b. Struktur umur penduduk

Struktur umur penduduk memberikan gambaran tentang potensi demografi yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan pembangunan yang responsif usia, terutama dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi.

Berdasarkan struktur umur penduduk Kampung Aparuka, terlihat bahwa komposisi penduduk menunjukkan beban ketergantungan yang cukup tinggi, meskipun kelompok usia produktif masih mendominasi. Kelompok usia non-produktif, yang terdiri atas penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (42,88%) dari total penduduk. Proporsi terbesar berasal dari kelompok usia anak 0-14 tahun (38,57%), menggambarkan tingginya jumlah penduduk usia

tanggungan. Distribusi penduduk Kampung Aparuka menurut umur pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Kampung Aparuka menurut Umur Tahun 2025

No.	Interval Umur (Tahun)	Jumlah	Presentase
1.	0 - 4	12	5,74
2.	5 - 9	32	15,13
3.	10 - 14	37	17,70
4.	15 - 19	31	14,83
5.	20 - 24	19	9,09
6.	25 - 29	3	1,44
7.	30 - 34	13	6,22
8.	35 - 39	15	7,18
9.	40 - 44	7	3,35
10.	45 - 49	5	2,39
11.	40 - 54	8	3,83
12.	55 - 59	5	2,39
13.	60 - 64	13	6,22
14.	65 - 69	2	0,96
15.	70 - 74	4	1,91
16.	75+	3	1,44
	Total	209	100

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Kampung Aparuka masih memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi. Tingginya proporsi usia anak ini juga mencerminkan tekanan demografis yang cukup kuat terhadap kelompok usia kerja dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi rumah tangga.

Sementara itu, penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) di Kampung Aparuka hanya mencakup sekitar 4,31% dari total penduduk. Proporsi ini menunjukkan bahwa struktur penduduk kampung belum memasuki fase penuaan penduduk. Meskipun jumlah lansia relatif kecil, keberadaannya tetap memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dasar, pendampingan sosial, serta dukungan keluarga dan komunitas. Dalam konteks kampung, peran keluarga dan solidaritas sosial masih menjadi penopang utama keberlanjutan hidup penduduk lanjut usia.

Distribusi penduduk kampung Aparuka berdasarkan Rasio beban tanggungan *(Dependency Ratio)* yaitu sebesar:

$$\frac{81 + 9}{119} \times 100 = 75{,}63 \text{ dibulatkan menjadi } 76$$

Sesuai dengan angka tersebut di atas, berarti DR di kampung Aparuka sebesar 76, dimana setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 76 orang yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan ≥ 64 tahun). Tingginya angka rasio beban tanggungan ini merupakan factor penghambat pembangunan ekonomi di kampung Aparuka, karena sebagian pendapatan yang diperoleh kelompok yang produktif terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum atau tidak produktif.

Kondisi ini menandakan bahwa pembangunan kampung perlu sangat memperhatikan layanan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja muda sekaligus menopang kesejahteraan keluarga yang menanggung banyak tanggungan.

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang berhasil ditempuh penduduk merupakan salah satu indikator utama untuk melihat kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan jenjang pendidikan formal tertinggi yang diselesaikan seseorang, sekaligus mencerminkan kemampuan literasi, kapasitas kerja, dan potensi keterlibatan dalam pembangunan sosial maupun ekonomi.

Di Kampung Aparuka, akses terhadap layanan pendidikan masih sangat terbatas karena hanya tersedia satu unit SD Negeri sebagai satu-satunya lembaga pendidikan formal yang dapat dijangkau langsung di kampung. Setelah tamat SD, peserta didik harus melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA yang umumnya berada di ibukota distrik Mimika Barat atau bahkan langsung ke Kota Timika, sehingga menuntut anak untuk tinggal jauh dari orang tua.

Kondisi ini menjadikan keberlanjutan sekolah sebagai tantangan besar bagi banyak keluarga, terutama karena keterbatasan biaya, akomodasi, dan dukungan logistik bagi anak-anak yang harus bersekolah di luar kampung. Situasi tersebut berdampak pada rendahnya angka keberlanjutan pendidikan dan masih tingginya risiko putus sekolah, khususnya pada masa transisi dari SD ke SMP.

Distribusi penduduk Kampung Aparuka menurut tingkat pendidikan pada tahun 2025 disajikan dalam tabel pada bagian berikut.

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk KampungAparuka menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		L	P		
1.	Tidak/belum sekolah	64	54	118	56,46
2.	Belum Tamat SD	14	32	46	22,01
3.	Tamat SD	5	3	8	3,83
4.	SLTP	29	3	32	15,31
5.	SLTA	4	1	5	2,39
6.	Perguruan Tinggi	0	0	0	0,00
	Jumlah	116	93	209	100

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Distribusi tingkat pendidikan penduduk Kampung Aparuka menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan formal. Lebih dari separuh penduduk (56,46%) tercatat tidak pernah bersekolah, sementara 22,01 persen lainnya belum menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Penduduk yang berhasil menamatkan SD hanya 3,83 persen, lulusan SMP 15,31 persen, dan lulusan SMA 2,39 persen, sedangkan penduduk dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi belum tercatat.

Komposisi tersebut menegaskan bahwa hampir seluruh penduduk Kampung Aparuka (97,61%), masih berada pada tingkat pendidikan dasar atau bahkan di bawahnya. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kapasitas literasi, keterampilan dasar, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal, menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kampung Aparuka.

d. Mata pencaharian/pekerjaan

Mata pencaharian merupakan kegiatan utama yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsep ini juga menggambarkan struktur ekonomi masyarakat, tingkat kemandirian, kemampuan memanfaatkan sumber daya lokal, serta sejauh mana suatu komunitas memiliki akses terhadap kesempatan kerja formal maupun informal.

Distribusi penduduk Kampung Aparuka menurut matapencaharian pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Aparuka menurut Matapencaharian Tahun 2025

No.	Matapencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Belum/Tidak berkerja	184	88,04
2.	Aparat Sipil Negara (ASN)	0	0,00
3.	Tenaga Pengajar	0	0,00
4.	Wiraswasta	1	0,48
5.	Petani tradisional	23	11,00
6.	Nelayan	1	0,48
	Jumlah	209	100

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Struktur mata pencaharian penduduk Kampung Aparuka menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat terbatas dan didominasi oleh penduduk yang belum atau tidak bekerja. Berdasarkan data, sebagian besar (88,04%) penduduk kampung tercatat belum atau tidak bekerja, mencerminkan bahwa sebagian besar warga belum terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif yang bersifat tetap maupun formal. Kondisi ini sejalan dengan gambaran bahwa banyak penduduk berada pada posisi tanggungan, termasuk ibu rumah tangga, anak usia sekolah, serta anggota keluarga yang belum terserap dalam aktivitas ekonomi yang terdata.

Jenis mata pencaharian yang ada masih sangat terbatas dan berskala kecil. Penduduk yang bekerja sebagai petani tradisional (11,00%), yang menjadi kelompok utama penopang aktivitas ekonomi kampung. Sementara itu, wiraswasta dan nelayan masing-masing hanya sekitar 0,48 persen, dan tidak terdapat penduduk yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga pengajar. Komposisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kampung Aparuka masih bertumpu pada kegiatan subsisten berbasis pertanian tradisional dan pemanfaatan sumber daya alam, dengan minimnya diversifikasi mata pencaharian, usaha jasa, perdagangan, maupun pekerjaan formal.



Penangkapan ikan secara tradisional (dok.ippm)

Secara keseluruhan, struktur mata pencaharian tersebut menggambarkan lemahnya basis ekonomi kampung dan terbatasnya peluang kerja produktif bagi masyarakat. Ketergantungan pada sebagian kecil penduduk yang bekerja berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pembangunan ekonomi yang terarah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif lokal, serta peningkatan keterampilan dan kapasitas kerja masyarakat Kampung Aparuka agar mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

e. Status sosial ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kampung Aparuka pada umumnya masih tergolong rendah dan mencerminkan kerentanan ekonomi yang bersifat struktural. Rata-rata pendapatan rumah tangga berada di bawah Rp.1.000.000 per bulan, lebih rendah dari garis kemiskinan Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebesar Rp1.099.143. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat sangat terbatas dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Secara spasial, perbedaan tingkat kesejahteraan antar-RT maupun antar-kelompok warga tidak terlalu mencolok, karena mayoritas penduduk berada pada kategori miskin. Hanya sebagian kecil penduduk pendatang yang memiliki usaha kecil, seperti kios, dengan pendapatan relatif lebih tetap dan berada pada posisi ekonomi sedikit lebih baik dibandingkan warga asli, meskipun jumlahnya sangat terbatas.

Kerentanan kesejahteraan ini berkaitan erat dengan posisi geografis Kampung Aparuka yang merupakan kampung paling jauh dari pusat Distrik Mimika Barat dibandingkan enam kampung lainnya. Jarak yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi menjadi hambatan utama mobilitas penduduk, baik untuk aktivitas ekonomi maupun untuk mengakses layanan dasar. Akses pendidikan formal di kampung hanya tersedia hingga jenjang Sekolah Dasar; untuk melanjutkan ke SMP dan SMA, anak-anak harus menuju ibu kota distrik atau ke Kota Timika, yang memerlukan biaya dan transportasi tambahan. Demikian pula dengan layanan kesehatan, yang tidak tersedia secara rutin di kampung, sehingga masyarakat harus mengandalkan fasilitas kesehatan di tingkat distrik tanpa dukungan transportasi reguler.

Dalam pola konsumsi rumah tangga, sebagian besar warga memprioritaskan pemenuhan pangan sederhana untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sehari-hari. Frekuensi makan rata-rata dua kali sehari, dengan menu yang didominasi pangan lokal seperti sagu, ikan, dan hasil kebun. Pengeluaran untuk pendidikan dasar relatif lebih ringan karena adanya program sekolah gratis dari pemerintah, namun biaya tidak langsung seperti transportasi dan kebutuhan penunjang tetap menjadi beban bagi keluarga.

Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sosial lainnya belum menjangkau seluruh warga yang seharusnya berhak menerima. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kelengkapan administrasi kependudukan, di mana masih terdapat penduduk yang belum memiliki e-KTP, sehingga tidak tercatat dalam basis data penerima bantuan resmi.

Dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Aparuka berlangsung lambat dan belum menunjukkan perubahan signifikan yang mampu mengangkat kondisi ekonomi kampung secara menyeluruh. Faktor keterpencilan wilayah, aksesibilitas yang rendah, serta terbatasnya peluang ekonomi lokal akibat jarak yang jauh dari pusat distrik menjadi penghambat utama dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Aparuka.

f. Agama dan lembaga keagamaan

Keberagaman agama di Kampung Atapo tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah penyebaran iman di wilayah Kabupaten Mimika. Pemahaman masyarakat tentang agama berakar pada kehadiran para misionaris Katolik berkebangsaan Belanda yang mulai memperkenalkan ajaran Katolik di wilayah Kokonao sejak tahun 1920-an. Sejak masa tersebut, nilai-nilai iman Katolik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam pembentukan jati diri, karakter, serta sistem nilai masyarakat setempat.

Berdasarkan data agregat Semester I Tahun 2025, seluruh penduduk Kampung Atapo atau Aparuka tercatat 100% menganut agama Katolik**.** Kondisi ini menjadikan Katolik sebagai agama yang sepenuhnya mewarnai kehidupan sosial, budaya, dan praktik keagamaan masyarakat. Aktivitas keagamaan

terorganisasi melalui Komunitas Basis (Kombas), dengan gereja berperan sebagai pusat pembinaan rohani sekaligus ruang pemersatu warga.

Dengan komposisi penduduk yang sepenuhnya Katolik, lembaga gereja dan para pelayan pastoral memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan nilai moral, etika sosial, dan solidaritas komunitas. Kegiatan gereja kerap terintegrasi dengan kehidupan kampung, seperti kerja bakti bersama, kunjungan pastoral ke keluarga, serta dukungan sosial bagi warga yang sakit atau berduka. Pola ini menjadikan kehidupan keagamaan sebagai salah satu pilar utama yang memperkuat kohesi sosial dan ketahanan komunitas di Kampung Aparuka.

4. Migrasi dan Mobilitas Penduduk

a. Migrasi masuk (*in-migration*)

Pergerakkan penduduk antar kampung di distrik Mimika Barat menuju kampung Aparuka berlangsung lancar karena tersedianya dermaga umum yang menjadi titik akses utama transportasi air. Dermaga ini memudahkan penduduk dari kampung sekitar maupun dari Kota Timika untuk datang ke kampung Aparuka. Mayoritas pendatang berasal dari Timika dengan tujuan utama untuk melakukan kunjungan keluarga, menghadiri acara keagamaan, atau berpartisipasi dalam kegiatan adat. Kehadiran penduduk non-OAP biasanya terkait pelaksanaan tugas tertentu, seperti pelayanan pemerintahan, kegiatan teknis, atau tugas kelembagaan. Meskipun mobilitas masuk cukup rutin terjadi, tidak terdapat pengaruh berarti terhadap struktur sosial, pola hubungan komunitas, maupun aktivitas ekonomi masyarakat Aparuka. Tatanan adat, solidaritas antar marga, serta pola ekonomi lokal tetap berjalan stabil.

b. Migrasi keluar (*out-migration*)

Penduduk kampung Aparuka melakukan migrasi keluar menuju ibukota distrik di Kokonau atau langsung ke kota Timika dengan tujuan bervariasi. Beberapa di antaranya menetap lebih lama di kota karena alasan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan, sementara lainnya kembali ke kampung setelah urusan selesai setelah mengunjungi keluarga, mengikuti kegiatan pemerintahan dan pelayanan keagamaan.

Mobilitas penduduk keluar ini memberikan dampak positif melalui pengiriman uang atau remitan dari anggota keluarga yang berada di kota, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan sosial di

kampung. Selain itu interaksi dengan lingkungan perkotaan turut membawa perubahan dalam cara pandang, gaya hidup dan pola komunikasi terutama generasi muda, meskipun tidak sampai menggeser nilai-nilai adat dan budaya lokal.

c. Mobilitas harian/berkala

Aktivitas keluar-masuk penduduk kampung Aparuka juga berlangsung secara harian maupun musiman. Pergerakan ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti mengambil hasil kebun, pergi ke dusun sagu, menangkap ikan di sungai, atau melakukan aktivitas lainnya ke ibukota distrik. Mobilitas berkala terjadi pada musim tertentu, terutama ketika masyarakat melakukan memperoleh hasil laut (udang dan kepiting) yang melimpah, pengolahan sagu, atau mengikuti agenda adat dan keagamaan di kampung tetangga yang letaknya bersambung. Pola pergerakan ini merupakan bagian dari rutinitas masyarakat dan tidak berdampak pada perubahan permanen dalam komposisi penduduk.

d. Dinamika perubahan komposisi penduduk

Meskipun terdapat mobilitas masuk, migrasi keluar dan pergerakan harian, komposisi penduduk Kampung Aparuka pada dasarnya tetap stabil. Dinamika mobilitas tersebut tidak menimbulkan perubahan berarti terhadap struktur demografi maupun proses perencanaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Jumlah penduduk cenderung konstan dan kebutuhan pelayanan publik masih dapat dipenuhi oleh kapasitas yang tersedia. Dengan demikian, mobilitas yang terjadi menjadi bagian dari dinamika sosial normal tanpa mempengaruhi pola pembangunan dan tata kehidupan di kampung Aparuka.

D. Pendidikan

1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan

a. Pandangan umum masyarakat

Pandangan umum masyarakat Kampung Aparuka menempatkan kearifan adat sebagai sumber pendidikan kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan melalui pengajaran formal. Adat dipahami sebagai pedoman moral, sosial, dan ekologis yang membentuk karakter individu sejak usia dini. Nilai-nilai tersebut hidup dalam aktivitas keseharian masyarakat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses

pembentukan sikap, tanggung jawab, serta relasi sosial antarwarga. Dalam pandangan masyarakat, kearifan adat berfungsi sebagai fondasi etika dan identitas kolektif yang menjaga keharmonisan kehidupan kampung.

b. Peran keluarga dalam pendidikan anak

Keluarga memegang peranan penting dalam proses pendidikan anak melalui pewarisan nilai-nilai adat dan norma sosial. Orang tua dan anggota keluarga secara langsung menanamkan sikap kebersamaan, saling menghormati, dan tanggung jawab melalui keterlibatan anak dalam kegiatan komunal seperti gotong royong atau kerja bakti**.** Melalui praktik ini, anak-anak belajar tentang kerja sama, kepedulian sosial, serta peran individu dalam komunitas. Selain itu, keluarga juga menjadi media utama dalam menanamkan etika, sopan santun, dan penghormatan kepada orang tua, tetua adat, serta sesama warga melalui keteladanan dalam perilaku sehari-hari.



Pendidikan utama dari ibu (dok.ippm)

c. Nilai-Nilai lokal tentang pendidikan

Nilai-nilai lokal masyarakat Kampung Aparuka memandang pendidikan sebagai proses pembentukan karakter yang menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan alam. Kearifan adat seperti sistem sasi mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, serta kesadaran ekologis dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berbagai ritus dan simbol budaya juga mengajarkan keberanian, ketangguhan mental, serta kedewasaan dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam kehidupan sosial dan keagamaan, ritus yang berkaitan dengan siklus hidup dipahami sebagai sarana pendidikan nilai keluarga, religiusitas, dan penghormatan terhadap leluhur.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat memandang bahwa pendidikan formal dan nilai-nilai kearifan lokal dapat berjalan saling melengkapi. Sekolah dipahami sebagai sarana penting untuk masa depan anak-anak, sementara nilai-nilai adat menjadi fondasi karakter yang memperkuat proses pendidikan. Oleh karena itu, tidak terdapat pandangan bahwa kearifan lokal menghambat pendidikan, melainkan justru dipandang sebagai penguat dalam membentuk

generasi yang beretika, berpengetahuan, dan berakar pada identitas budaya Kampung Aparuka.

d. Isu dan tantangan sosial

Salah satu isu dan tantangan utama dalam bidang pendidikan di Kampung Aparuka adalah masih adanya praktik pernikahan dini, yang dalam pandangan sebagian warga dipahami sebagai bagian dari strategi keluarga untuk menambah jumlah kepala keluarga (KK) dan anggota rumah tangga. Pernikahan dini sering dipersepsikan sebagai cara untuk memperkuat struktur keluarga dan memastikan keberlanjutan tenaga kerja keluarga di masa depan, terutama untuk membantu orang tua dalam aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, anak-anak dipandang memiliki peran penting sebagai bagian dari tenaga keluarga, sehingga orientasi masa depan mereka lebih diarahkan pada kontribusi langsung terhadap kehidupan rumah tangga dibandingkan pada keberlanjutan pendidikan formal. Nilai ini ditanamkan sejak usia dini hingga dewasa sebagai bentuk pembelajaran kehidupan, di mana anak dipersiapkan untuk segera memikul tanggung jawab keluarga. Akibatnya pendidikan formal belum sepenuhnya diposisikan sebagai kebutuhan utama, melainkan sebagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga.

2. Kelembagaan Pendidikan

a. Jenis Lembaga dan status sekolah

Kondisi layanan pendidikan di Kampung Aparuka saat ini masih terbatas pada jenjang pendidikan dasar. Di kampung ini hanya tersedia Sekolah Dasar Negeri (SDN), sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dilayani pada satuan pendidikan tersebut. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, peserta didik harus pergi ke Distrik Kokonao. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pendidikan anak setelah tamat SD, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan sarana transportasi. Selain pendidikan formal, pendidikan keagamaan dilaksanakan melalui kegiatan Sekolah Minggu setiap hari Minggu, sementara pada hari Senin hingga Sabtu kegiatan pembelajaran formal tetap berjalan menggunakan Kurikulum 2013 (K-13).

b. Fasilitas sekolah

Dari sisi sarana dan prasarana, sekolah di Kampung Aparuka telah memiliki gedung sekolah yang permanen, satu gedung kantor yang juga difungsikan

sebagai ruang guru, enam ruang kelas, serta satu ruang perpustakaan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan fasilitas penunjang, khususnya belum tersedianya sarana MCK yang memadai di lingkungan sekolah. Kekurangan ini berpotensi mempengaruhi kenyamanan, kesehatan dan kualitas lingkungan belajar siswa, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan pembangunan lebih lanjut.


Gedung SD Negeri Aparuka (dok.ippm)

c. Aksesibilitas sekolah

Aksesibilitas menuju sekolah bagi anak-anak relatif sangat baik. Letak gedung sekolah yang berada di tengah kampung memungkinkan seluruh siswa menjangkau sekolah dengan berjalan kaki tanpa hambatan berarti. Kondisi ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Kampung Aparuka, karena tidak terdapat kendala jarak maupun transportasi pada jenjang pendidikan dasar, sehingga kehadiran siswa ke sekolah dapat terjaga dengan baik.

d. Manajemen dan tata kelola

Dari sisi tata kelola dan partisipasi masyarakat, komite sekolah secara formal telah terbentuk, namun perannya belum berjalan secara optimal dan cenderung bersifat administratif. Meskipun demikian, hubungan antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat secara umum berlangsung cukup harmonis. Kerja sama dalam mendukung kegiatan sekolah dan proses pembelajaran anak berjalan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kendala sosial yang berarti dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya modal sosial yang kuat, apabila dioptimalkan melalui penguatan peran komite sekolah dan peningkatan kapasitas partisipasi orang tua, dapat menjadi faktor pendukung penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kampung Aparuka.

3. Keadaan Guru dan Murid

Ketersediaan tenaga pendidik di SD Negeri Aparuka secara jumlah relatif mencukupi untuk melayani kebutuhan pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Sekolah ini didukung oleh 5 orang guru berstatus PNS**,** satu orang guru kontrak**,** serta satu orang kepala sekolah**,** yang seluruhnya memiliki kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1)**.** Berdasarkan data DAPODIK, jumlah peserta didik tercatat sebanyak 156

siswa. Dengan komposisi tersebut, rasio guru terhadap siswa secara kuantitatif tergolong memadai, sehingga secara teoritis proses pembelajaran dapat berlangsung dengan pembagian kelas dan beban mengajar yang relatif seimbang.

Dari sisi kehadiran, guru-guru di SD Negeri Aparuka pada umumnya menunjukkan tingkat disiplin yang cukup baik. Setiap hari, mulai Senin hingga Sabtu, guru hadir di sekolah dan melakukan penandatanganan daftar hadir sebagai bukti kehadiran. Kondisi ini mencerminkan komitmen guru dalam menjalankan tugas pengajaran serta menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan terkait konsistensi kehadiran guru dalam jangka waktu tertentu. Guru-guru kerap harus ke kota untuk mengurus berbagai keperluan administratif maupun pribadi, yang sering kali menyebabkan mereka meninggalkan tempat tugas dalam waktu cukup lama. Keterbatasan akses dan sarana transportasi dari Kampung Aparuka menuju pusat kota menjadi faktor utama yang memperpanjang durasi ketidakhadiran tersebut. Kondisi ini berpotensi mengganggu kontinuitas pembelajaran, terutama apabila tidak diimbangi dengan pengaturan jadwal pengganti atau mekanisme pembelajaran alternatif.

Secara keseluruhan, kualitas tenaga pendidik di SD Negeri Aparuka dari sisi kualifikasi dan jumlah sudah relatif baik, namun masih dihadapkan pada tantangan geografis dan aksesibilitas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem manajemen sekolah, pengaturan kehadiran guru yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah terpencil, serta dukungan kebijakan yang memudahkan urusan administrasi guru tanpa harus sering meninggalkan lokasi tugas, guna menjaga mutu layanan pendidikan bagi siswa di Kampung Aparuka.

4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar

a. Kehadiran dan keaktifan siswa

Kehadiran siswa di SD Negeri Aparuka belum berlangsung secara konsisten. Ketidakhadiran siswa sering terjadi karena anak-anak mengikuti orang tua ke dusun untuk berkebun atau pergi ke kota dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan proses belajar mengajar tidak diikuti secara utuh oleh seluruh siswa. Dari sisi keaktifan, keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih cenderung pasif. Sebagian besar siswa lebih banyak mendengarkan dan menerima

materi, dengan partisipasi terbatas dalam bertanya, berdiskusi, maupun kegiatan belajar aktif lainnya.

b. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga terhadap proses pendidikan anak masih tergolong rendah. Pendampingan belajar di rumah jarang dilakukan karena sebagian besar orang tua memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kurang mampu membantu anak dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, ketersediaan sarana belajar di rumah, seperti buku, alat tulis, dan bahan bacaan pendukung, sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada lemahnya penguatan belajar siswa di luar jam sekolah.

c. Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi

Rendahnya partisipasi siswa dalam pendidikan dipengaruhi oleh beban kerja anak dalam membantu orang tua, baik di kebun, mencari ikan, maupun mengikuti orang tua ke kota. Aktivitas tersebut seringkali lebih diprioritaskan dibandingkan kehadiran di sekolah. Selain itu, motivasi belajar siswa relatif rendah karena hasil pendidikan formal belum dipahami sebagai sesuatu yang dapat secara langsung meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Pandangan ini menyebabkan pendidikan belum sepenuhnya dianggap sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari.

d. Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Aparuka belum terprogram secara formal dan berkelanjutan. Aktivitas di luar jam pelajaran umumnya dilakukan secara mandiri oleh siswa, terutama saat menunggu guru atau pada waktu luang. Kegiatan tersebut biasanya berupa olahraga sederhana dan bermain di sekitar halaman sekolah tanpa pendampingan guru maupun perencanaan yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan minat, bakat, dan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler masih sangat terbatas dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

5. Pendidikan Non Formal

a. Jenis pendidikan nonformal dan penyelenggara

Di Kampung Aparuka hingga saat ini belum tersedia layanan pendidikan nonformal yang terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), keaksaraan fungsional, pelatihan keterampilan

(menjahit, pertukangan, perikanan, kerajinan), kursus komputer maupun bahasa, serta pelatihan kepemudaan tidak dilaksanakan di tingkat kampung. Keterbatasan fasilitas, sarana belajar, dan tenaga pendamping menjadi faktor utama belum berkembangnya pendidikan nonformal di Aparuka.

Apabila masyarakat membutuhkan layanan pendidikan nonformal, mereka harus mengaksesnya ke ibu kota distrik atau langsung ke Kota Timika**,** yang memerlukan biaya, waktu, dan sarana transportasi tambahan. Pendidikan nonformal yang masih berlangsung secara terbatas di kampung hanya bersifat keagamaan, seperti Sekolah Minggu**,** yang diselenggarakan oleh gereja dan lebih berfokus pada pembinaan iman dan karakter, bukan pada peningkatan keterampilan atau kecakapan hidup.

b. Peserta pendidikan nonformal

Kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi sasaran pendidikan nonformal di Kampung Aparuka meliputi pemuda putus sekolah**,** ibu rumah tangga**,** pencari kerja**,** serta masyarakat umum yang membutuhkan peningkatan literasi dan keterampilan kerja. Namun, karena tidak adanya lembaga dan program pendidikan nonformal di kampung, kelompok-kelompok tersebut belum mendapatkan layanan pengembangan kapasitas secara memadai di lingkungan tempat tinggal mereka.

c. Tantangan pengembangan pendidikan nonformal

Pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Aparuka menghadapi berbagai tantangan mendasar. Pertama, keterbatasan instruktur atau tenaga pendamping yang kompeten dan bersedia bertugas di wilayah kampung. Kedua, sarana dan prasarana belajar yang sangat terbatas**,** termasuk ruang belajar, peralatan praktik, dan bahan ajar. Ketiga, minimnya minat dan partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh orientasi ekonomi jangka pendek serta belum kuatnya kesadaran akan manfaat pendidikan nonformal bagi peningkatan kesejahteraan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Aparuka memerlukan dukungan kebijakan, fasilitasi sarana dasar, serta pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada akses pendidikan di luar kampung.

E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit, dan Penyakit

a. Pemaknaan “sehat” menurut masyarakat

Di Kampung Aparuka, konsep kesehatan pada umumnya dipahami secara fungsional, yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk tetap menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Seseorang dianggap sehat selama masih mampu bekerja, pergi ke kebun, mendayung perahu, menangkap ikan serta melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan tanggungjawab ekonomi keluarga. Selama tidak terdapat keluhan fisik yang dirasakan secara langsung dan mengganggu aktivitas, kondisi tubuh tersebut dipersepsikan sebagai sehat. Dengan demikian ukuran kesehatan lebih banyak ditekankan pada kemampuan bergerak dan berkontribusi bagi keluarga, dibandingkan pada penilaian medis atau pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, kehamilan dipandang sebagai proses alamiah yang secara normal akan berlangsung “sembilan bulan sepuluh hari” hingga persalinan. Pandangan ini membuat kehamilan tidak selalu dianggap sebagai kondisi yang memerlukan pendampingan tenaga kesehatan secara intensif. Akibatnya sebagian ibu hamil jarang melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke puskesmas atau tenaga kesehatan, sehingga kondisi kesehatan ibu dan janin kurang terpantau. Praktik ini berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kehamilan yang tidak terdeteksi sejak dini.

Pandangan serupa juga mempengaruhi cara masyarakat menilai status gizi dan kesehatan anak. Bayi dengan berat lahir rendah atau balita yang mengalami kekurangan gizi seringkali tidak dianggap bermasalah selama masih tampak aktif, bergerak, dan bermain seperti anak-anak lainnya. Gejala kekurangan gizi tidak selalu dipersepsikan sebagai persoalan kesehatan yang serius, karena indikator kesehatan lebih didasarkan pada aktivitas fisik anak daripada pada ukuran pertumbuhan, berat badan atau penilaian gizi secara medis.

Selain itu, masyarakat Kampung Aparuka masih memiliki konsep dan persepsi lokal bahwa sakit tidak semata-mata disebabkan oleh faktor biologis atau penyakit medis. Penyakit juga dapat dipahami sebagai akibat dari pelanggaran adat, ketidakseimbangan hubungan dengan alam, atau gangguan dari kekuatan non-fisik. Dalam kerangka berpikir ini, kesehatan dipandang sebagai kondisi

keseimbangan antara manusia, alam dan tatanan adat. Ketika keseimbangan tersebut terganggu, seseorang dapat jatuh sakit meskipun tidak menunjukkan gejala medis yang jelas.

Konsep kesehatan yang berlapis antara pemahaman fungsional, pandangan adat dan pengetahuan medis modern ini membentuk pola perilaku kesehatan masyarakat Aparuka. Di satu sisi, nilai-nilai lokal memperkuat ketahanan sosial dan cara masyarakat memaknai kehidupan. Namun di sisi lain, pandangan tersebut dapat menjadi tantangan dalam upaya peningkatan layanan kesehatan, khususnya dalam mendorong pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan kehamilan, serta pencegahan masalah gizi dan penyakit. Oleh karena itu pendekatan pelayanan kesehatan di Kampung Aparuka perlu dilakukan secara kontekstual, dengan menghargai nilai-nilai lokal sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan layanan kesehatan berbasis medis.

b. Pemaknaan "sakit"

Masyarakat Kampung Aparuka memaknai penyakit melalui dua sudut pandang utama, yakni sakit yang bersifat fisik dan sakit yang dianggap berkaitan dengan faktor spiritual maupun pelanggaran adat. Cara pandang ganda ini mempengaruhi bagaimana mereka membaca gejala serta menentukan bentuk penanganan yang dianggap tepat.

Penyakit fisik dipahami sebagai gangguan kesehatan yang muncul karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Keluhan yang sering dijumpai misalnya demam atau badan lemas yang dikaitkan dengan malaria, batuk akibat paparan debu, serta luka-luka karena kurang hati-hati saat bekerja di kebun, di sungai atau di hutan. Jenis penyakit seperti ini dipandang sebagai bagian dari risiko aktivitas harian dan biasanya terlebih dahulu ditangani secara sederhana di rumah sebelum keluarga memutuskan mencari bantuan tenaga kesehatan.

Di luar penyebab fisik, masyarakat juga meyakini adanya penyakit yang bersumber dari faktor nonfisik seperti gangguan roh atau pelanggaran terhadap aturan adat dan hubungan dengan alam. Dalam kerangka kepercayaan lokal, sakit dapat dianggap muncul karena ketidakseimbangan dengan dunia roh atau karena tindakan tertentu yang dinilai melanggar norma adat, sehingga dalam situasi seperti ini keluarga cenderung menghubungi tokoh adat atau tokoh agama untuk

memohon doa, nasihat, atau ritual tertentu, baik sebelum maupun bersamaan dengan pengobatan medis.

Tanda-tanda awal seseorang mulai dianggap sakit biasanya dikenali dari perubahan tubuh yang dianggap tidak lazim. Rasa panas-dingin sering dihubungkan dengan "kena angin lewat" atau "angin jahat", sementara rasa lelah berlebihan atau pusing bisa dimaknai sebagai akibat "salah jalan" ketika melintas di tempat-tempat yang dipercaya memiliki kekuatan tertentu. Cara memahami gejala seperti ini mendorong keluarga melakukan penanganan awal secara tradisional, misalnya dengan pijatan, ramuan herbal atau ritual sederhana, sebelum pasien dibawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas.

2. Kesehatan

a. Jenis dan ketersediaan fasilitas kesehatan

Akses masyarakat Kampung Aparuka terhadap fasilitas kesehatan masih sangat terbatas**.** Di tingkat kampung tidak tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), maupun Polindes. Apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, masyarakat harus pergi ke Puskesmas di ibu kota distrik atau langsung ke rumah sakit di Kota Timika**.** Kondisi ini menempatkan jarak dan akses sebagai hambatan utama dalam memperoleh layanan kesehatan yang tepat waktu.

Satu-satunya layanan kesehatan yang tersedia di Kampung Aparuka adalah Posyandu**,** yang menjadi titik pelayanan kesehatan dasar terutama bagi balita dan ibu hamil. Namun layanan Posyandu bersifat terbatas**,** karena frekuensi kunjungan tenaga kesehatan yang terjadwal sekali dalam sebulan dan sangat bergantung pada jadwal dan kehadiran petugas dari Puskesmas distrik. Keterbatasan ini menyebabkan pemantauan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan, tidak dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

Dalam konteks keterbatasan layanan formal tersebut, Program Kampung Sehat di Kampung Aparuka yang digagas Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) memiliki peran strategis untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis kampung. Program ini perlu dioptimalkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai kegiatan pendukung, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat Aparuka. Penguatan kapasitas kader kesehatan kampung, peningkatan frekuensi

pendampingan kesehatan, serta integrasi dengan layanan Posyandu dan Puskesmas distrik menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih rutin, mudah diakses dan berorientasi pada pencegahan serta peningkatan kualitas hidup jangka panjang.

b. Tenaga kesehatan yang tersedia dan kendala akses

Tenaga kesehatan yang melayani masyarakat Kampung Aparuka berasal dari Puskesmas distrik**,** terdiri atas perawat, bidan dan tenaga gizi. Dokter umum tersedia di tingkat distrik, sehingga pemeriksaan medis lanjutan dan rujukan dapat dilakukan di luar kampung. Namun kehadiran tenaga kesehatan di Kampung Aparuka bersifat berkala**,** mengikuti jadwal kunjungan bulanan yang bersamaan dengan pelayanan Posyandu.

Kondisi ini menjadi tantangan besar ketika terjadi kasus sakit mendadak atau kondisi gawat darurat**.** Keterbatasan transportasi merupakan masalah utama, termasuk ketersediaan bahan bakar**,** ketergantungan pada kondisi air pasang**,** serta minimnya moda transportasi yang siap setiap waktu. Dalam situasi darurat, proses membawa pasien ke Puskesmas distrik atau ke Kota Timika seringkali sangat sulit dan memakan waktu**,** sehingga penanganan medis tidak dapat dilakukan secara cepat.

Akibat keterbatasan tersebut, masyarakat Kampung Aparuka dalam banyak kasus sangat mengandalkan obat-obatan ramuan tradisional sebagai upaya pertolongan pertama, terutama saat sakit terjadi di malam hari atau ketika transportasi tidak memungkinkan. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, banyak ibu hamil baru mencari layanan kesehatan ketika sudah berada dalam kondisi darurat. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan masih rendah, karena sebagian ibu lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun kampung**,** yang dianggap lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Secara keseluruhan, kondisi layanan kesehatan di Kampung Aparuka mencerminkan tantangan wilayah terpencil, di mana keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan yang tidak menetap, serta kendala transportasi sangat memengaruhi akses dan kualitas pelayanan. Situasi ini menuntut pendekatan pelayanan kesehatan yang lebih adaptif, termasuk penguatan layanan dasar di tingkat kampung, peningkatan frekuensi kunjungan tenaga kesehatan, serta penyediaan

dukungan transportasi darurat agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara lebih cepat dan aman.

3. Gizi

a. Akses pangan bergizi

Akses masyarakat Kampung Aparuka terhadap pangan bergizi sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitar permukiman. Konsumsi lauk hewani terutama dipenuhi dari hasil tangkapan sungai seperti ikan, udang dan kepiting yang relatif mudah diperoleh tanpa biaya. Sementara itu, lauk hewani yang harus dibeli seperti ayam dan telur jarang dikonsumsi karena harganya tidak terjangkau oleh sebagian besar keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat, masyarakat lebih mengandalkan pangan lokal seperti sagu dari dusun sagu, ubi dari lahan kering serta sayur hutan yang tersedia secara musiman. Namun, variasi konsumsi ini masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mendukung pemenuhan gizi seimbang.

Selain mengandalkan pangan lokal, masyarakat Aparuka juga sangat bergantung pada beras yang diperoleh dari bantuan pemerintah. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan keluarga masih rapuh, terutama ketika pasokan bantuan tidak rutin atau akses transportasi ke Timika terhambat. Kondisi ini berdampak pada pola konsumsi harian yang cenderung sederhana dan kurang bervariasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi lebih optimal.

b. Program gizi di kampung

Pelaksanaan program gizi di Kampung Aparuka masih menghadapi berbagai keterbatasan. Posyandu balita yang menjadi ujung tombak pelayanan gizi belum mampu menerapkan sistem lima meja secara optimal akibat kurangnya tenaga terlatih dan peralatan pendukung. Kegiatan penimbangan berat badan tetap dilakukan setiap kunjungan, namun cakupannya rendah karena tidak semua ibu membawa anak secara rutin. Meskipun demikian, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) hampir selalu dilaksanakan ketika ada bahan atau dukungan dari petugas kesehatan. Menu PMT umumnya sederhana, disesuaikan dengan bahan pangan yang tersedia di kampung, dan lebih bersifat mengisi energi daripada memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

c. Perilaku dan pengetahuan gizi keluarga

Pengetahuan gizi keluarga di Kampung Aparuka masih tergolong terbatas, sehingga pola konsumsi rumah tangga cenderung sederhana dan kurang bervariasi. Pengolahan dan penyajian makanan belum membedakan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok usia. Balita dan orang dewasa umumnya mengonsumsi menu yang sama, yang didominasi nasi dan lauk sederhana tanpa sayuran atau sumber gizi yang seimbang. Kebiasaan makan bersama keluarga juga belum menjadi tradisi yang kuat, sementara balita biasanya disuapi oleh ibu tanpa pengaturan porsi dan tanpa pertimbangan kandungan zat gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak.

Pola konsumsi ini semakin dipengaruhi oleh adanya berbagai mitos dan pantangan makanan, khususnya bagi ibu hamil. Beberapa jenis pangan hewani yang sebenarnya kaya protein dan zat besi dihindari karena kepercayaan turun-temurun. Penyu (teteruga) dipercaya dapat menyebabkan anak lahir dengan kaki berbentuk O, udang dianggap dapat membuat bayi terkena cacar air, daging buaya diyakini menyebabkan bayi lahir dengan kelebihan jari, sementara tikus tanah dipercaya membuat bayi lahir dengan telinga panjang. Kepercayaan tersebut mendorong ibu hamil untuk menghindari sumber protein hewani tertentu, sehingga asupan gizi selama kehamilan menjadi tidak seimbang.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah gizi, seperti anemia pada ibu hamil dan gangguan pertumbuhan janin. Berdasarkan pengamatan fisik di lapangan, kasus stunting pada anak dan anemia pada ibu hamil diduga sudah ada di Kampung Aparuka, namun hingga kini belum dilakukan pengukuran dan pemantauan status gizi secara sistematis. Tidak adanya data antropometri dan pemeriksaan gizi rutin menyebabkan masalah tersebut belum dikenali secara formal dan cenderung dianggap sebagai kondisi yang wajar atau bukan persoalan kesehatan yang serius, selama ibu dan anak masih terlihat aktif secara fisik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan gizi medis dan persepsi kesehatan lokal masyarakat. Tanpa intervensi yang tepat, keterbatasan pemahaman gizi dan kuatnya kepercayaan terhadap pantangan makanan berisiko mempertahankan masalah gizi kronis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi gizi yang sensitif terhadap budaya

lokal, disertai dengan pemantauan status gizi yang lebih teratur, agar masyarakat dapat memahami pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak sebagai investasi kesehatan generasi masa depan Kampung Aparuka.

d. Ketersediaan sumber pangan lokal

Sumber pangan lokal di Kampung Aparuka sebagian besar berasal dari dusun sagu, tempat masyarakat mengambil tepung sagu sebagai makanan pokok. Masyarakat tidak memiliki kebun keluarga yang dikelola secara khusus, sehingga pemenuhan sayur-sayuran bergantung pada hasil alam yang tersedia atau pembelian dari luar kampung. Sumber pangan dari perairan cukup melimpah, termasuk berbagai jenis ikan sungai, udang dan kepiting yang menjadi sumber protein utama masyarakat.

Namun terkait dengan ketahanan pangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Pada saat pasang air besar, air masuk ke rumah-rumah sehingga aktivitas memasak dan pengolahan sagu terganggu. Kondisi ini sering menjadi masa sulit pangan karena tanaman sayuran tidak dapat tumbuh subur di lingkungan yang tergenang, sehingga masyarakat harus membeli sayuran dari Kota Timika dengan biaya yang lebih tinggi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan lokal masih rentan dan sangat bergantung pada faktor musim dan akses transportasi.

4. Keluarga Berencana

a. Pemahaman masyarakat tentang KB

Masyarakat Kampung Aparuka pada dasarnya memahami bahwa program Keluarga Berencana (KB) bertujuan mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik sehari-hari, terutama bagi keluarga-keluarga suami-sitri pasangan usia subur. Banyak keluarga masih memiliki jumlah anak yang besar dengan jarak kelahiran yang relatif dekat, sehingga berkontribusi pada tingginya risiko kehamilan berulang dan kasus bayi berat lahir rendah (BBLR).

Walaupun beberapa PUS (Pasangan Usia Subur) sudah menjadi akseptor dengan menggunakan kontrasepesi KB, namun sebagian masyarakat dan PUS memandang penggunaan alat kontrasepsi sebagai sesuatu yang kurang selaras dengan nilai adat atau kepercayaan, khususnya karena dianggap sebagai “benda

asing" yang dimasukkan ke dalam tubuh. Pandangan ini secara tidak langsung menghambat penerimaan metode kontrasepsi modern, terutama pada kelompok usia muda dan ibu yang baru melahirkan.

b. Akses layanan KB

Akses layanan Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat Kampung Aparuka saat ini hanya tersedia melalui Puskesmas Kokonao yang menyediakan layanan alat kontrasepsi serta tenaga kesehatan untuk penyuluhan dan pelayanan pemasangan. Secara teknis, fasilitas dasar KB relatif tersedia di tingkat distrik. Namun, keterjangkauan layanan tersebut masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat Aparuka.

Jarak Kampung Aparuka yang cukup jauh dari pusat distrik, ditambah dengan keterbatasan sarana transportasi, menyebabkan layanan KB tidak menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mengakses layanan KB, warga harus mengeluarkan biaya tambahan, menyesuaikan waktu perjalanan, serta bergantung pada kondisi transportasi dan alam. Situasi ini membuat banyak pasangan usia subur enggan atau menunda kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan KB.

Selain itu, kunjungan layanan bergerak KB ke Kampung Aparuka masih sangat terbatas, baik dari sisi frekuensi maupun cakupan penyuluhan. Minimnya intensitas edukasi dan pendampingan berkelanjutan menyebabkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pilihan metode KB belum terbentuk secara kuat. Akibatnya, penggunaan kontrasepsi cenderung tidak konsisten. Terdapat pasangan yang pernah aktif sebagai akseptor KB, namun kemudian putus pakai dan berhenti, terutama ketika masa penggunaan alat kontrasepsi habis dan tidak diikuti dengan kunjungan ulang ke Puskesmas.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan layanan KB dengan tingkat pemanfaatannya di masyarakat. Tanpa akses yang lebih dekat, layanan yang berkesinambungan, serta pendampingan yang rutin, keberlanjutan program KB di Kampung Aparuka sulit terjaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan layanan KB berbasis kampung, peningkatan frekuensi kunjungan tenaga kesehatan, serta pendekatan penyuluhan yang kontekstual agar pasangan usia subur dapat memperoleh layanan KB secara mudah, teratur dan berkelanjutan.

c. Frekuensi kelahiran dan tren keluarga

Rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga di Kampung Aparuka berkisar antara 3-6 orang, yang mencerminkan kuatnya pola keluarga besar dalam struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Anak dipandang sebagai pewaris keturunan suku, penjaga keberlanjutan marga, serta simbol kekuatan dan keberlangsungan keluarga. Selain nilai simbolik tersebut, anak juga memiliki nilai fungsional sebagai tenaga bantu keluarga, khususnya dalam aktivitas ekonomi seperti berkebun, mencari ikan, dan membantu pekerjaan rumah tangga. Pandangan ini memperkuat kecenderungan keluarga untuk memiliki jumlah anak yang relatif banyak.

Dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak secara umum tergolong tinggi dalam tataran nilai dan perhatian keluarga. Namun, praktik di lapangan masih sangat dipengaruhi oleh pembagian peran gender tradisional. Ibu memikul tanggung jawab ganda, tidak hanya sebagai pihak yang menjalankan fungsi reproduksi melalui kehamilan dan persalinan, tetapi juga sebagai tenaga produktif yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi keluarga. Sebaliknya, peran laki-laki dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, dan penggunaan layanan KB cenderung lebih pasif, dengan anggapan bahwa urusan kehamilan, persalinan dan pengasuhan merupakan ranah perempuan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada dinamika keluarga dan frekuensi kelahiran. Keputusan untuk memiliki banyak anak sering kali tidak melalui perencanaan yang matang dari sisi kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga, melainkan didorong oleh nilai budaya dan kebutuhan tenaga keluarga. Dalam konteks ini, upaya pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengubah pola pikir dan keterlibatan laki-laki dalam program KB.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kampung Aparuka memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga pada penataan kembali peran keluarga secara lebih setara. Penguatan kesadaran tentang Keluarga Berencana, yang menekankan kesehatan ibu, kualitas pengasuhan, dan masa depan anak, perlu dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai budaya lokal. Dengan demikian nilai anak sebagai pewaris

keturunan dan penopang keluarga dapat tetap terjaga, sekaligus diimbangi dengan perencanaan keluarga yang lebih sehat dan berkelanjutan.

F. Ekonomi Masyarakat

D. Aktivitas Penduduk

Pola kerja masyarakat Aparuka hingga kini masih didominasi oleh aktivitas tradisional, seperti berkebun skala kecil, mengambil hasil hutan, serta menangkap ikan, udang, dan kepiting dengan alat yang sederhana. Jam kerja warga umumnya lentur dan sangat dipengaruhi oleh ritme alam: nelayan biasa berangkat pada dini hari hingga pagi, sementara petani atau pekebun bekerja dari pagi hingga menjelang siang. Hampir tidak terlihat kegiatan berbasis sektor formal, sehingga tulang punggung ekonomi keluarga bertumpu pada aktivitas informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan lokasi kerja yang umumnya masih berada di sekitar kampung, baik di sungai maupun lahan garapan.

Sebagian warga menekuni pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan, seperti membuat kerajinan sederhana, menokok sagu pada musim tertentu, atau menjual hasil laut dalam jumlah terbatas. Kaum muda kerap berperan sebagai tenaga bantu dalam pekerjaan konstruksi kampung, perbaikan sarana umum, atau membantu orang tua di sektor perikanan, sedangkan perempuan selain mengurus rumah tangga juga aktif mengolah hasil tangkapan, menyiapkan kebutuhan logistik untuk melaut, dan berdagang makanan atau barang kecil-kecilan. Kombinasi antara aktivitas utama dan tambahan ini menggambarkan bahwa sumber penghidupan masyarakat Aparuka masih berupa campuran tradisional-modern dengan ketergantungan besar pada sektor informal dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kampung.



Anak muda membantu orangtua (dok.ippm)

E. Kepemilikan Modal

Kepemilikan modal produktif di Kampung Aparuka masih didominasi oleh aset-aset tradisional yang digunakan untuk menopang aktivitas ekonomi subsisten masyarakat. Modal utama yang dimiliki warga umumnya berupa perahu kayu tanpa mesin, jaring dan alat pancing sederhana, serta perkakas manual untuk kegiatan

berkebun. Hanya sebagian kecil keluarga yang telah memiliki perahu bermesin (longboat), sehingga kapasitas produksi masyarakat secara umum masih bertumpu pada peralatan sederhana dan tenaga kerja keluarga sendiri. Kondisi ini membatasi jangkauan usaha, produktivitas, dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan secara signifikan.

Dari sisi aset rumah tangga, kepemilikan juga menunjukkan keterbatasan dan ketimpangan. Sebagian besar keluarga belum memiliki sarana komunikasi seperti telepon seluler, selain karena keterbatasan ekonomi juga disebabkan oleh tidak tersedianya jaringan sinyal di Kampung Aparuka. Komunikasi baru dapat dilakukan ketika warga pergi ke ibu kota distrik. Selain itu, masih banyak rumah tangga yang belum memiliki perlengkapan dasar yang memadai, sehingga kualitas hidup sehari-hari relatif rendah dan sangat bergantung pada kondisi alam serta kemampuan ekonomi keluarga.

Modal usaha masyarakat umumnya bersumber dari tabungan keluarga dan dukungan internal melalui kelompok tani atau nelayan yang bersifat informal. Pemanfaatan sumber permodalan formal, seperti lembaga keuangan atau kredit usaha, masih sangat terbatas karena kendala akses, informasi dan jaminan. Dalam konteks ini, bantuan pemerintah berupa perahu, jaring, atau dukungan modal ekonomi desa menjadi tambahan penting bagi masyarakat, meskipun usaha yang dikembangkan umumnya masih berskala kecil dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan harian, bukan untuk ekspansi usaha jangka panjang.

Pengelolaan modal di Kampung Aparuka pada umumnya masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga keberlanjutan usaha sering terkendala oleh pendapatan yang fluktuatif dan ketergantungan tinggi pada kondisi alam, seperti cuaca dan musim. Ketimpangan kepemilikan modal terlihat jelas antara keluarga nelayan yang memiliki perahu bermesin dengan keluarga yang masih mengandalkan alat tangkap tradisional. Namun demikian praktik gotong royong dan saling membantu antarwarga masih berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menopang kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat Kampung Aparuka.

F. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi di Kampung Aparuka hingga saat ini masih sangat terbatas bahkan nyaris belum terbentuk secara formal. Di tingkat kampung belum terdapat koperasi, kelompok tani atau nelayan, Badan Usaha Milik Kampung, arisan

modal, maupun kios kampung yang dikelola secara kelembagaan. Ketiadaan lembaga-lembaga ini membuat aktivitas ekonomi warga berjalan secara individual dan rumah tangga, tanpa wadah bersama yang dapat menghimpun, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal secara terorganisir.

Karena belum ada kelembagaan ekonomi yang berfungsi, peran institusi lokal dalam meningkatkan pendapatan warga juga belum terlihat signifikan. Tidak terdapat mekanisme tatakelola ekonomi berbasis adat seperti sistem bagi hasil tradisional yang diatur melalui aturan kampung, sehingga hubungan ekonomi antarwarga lebih banyak berlangsung secara informal dan kekeluargaan, misalnya melalui saling bantu atau pinjam-meminjam dalam skala kecil. Tingkat keaktifan kelembagaan ekonomi dan partisipasi warga dalam organisasi ekonomi bersama praktis tidak ada, karena wadahnya memang belum terbentuk di Kampung Aparuka.

Di sisi lain, dukungan eksternal untuk penguatan kelembagaan ekonomi juga masih sangat minim. Sampai saat ini belum tampak adanya program khusus dari pemerintah, NGO, CSR perusahaan, maupun lembaga keagamaan yang secara spesifik membentuk atau mendampingi koperasi, kelompok usaha bersama di tingkat kampung. Kondisi ini membuat pengembangan ekonomi masyarakat Aparuka sangat bergantung pada inisiatif individu dan keluarga, sehingga ke depan diperlukan dukungan serius untuk membangun kelembagaan ekonomi yang mampu mengelola potensi lokal dan memperkuat posisi tawar warga dalam kegiatan ekonomi.

G. Harga Barang dan Bahan Makanan

Harga bahan pokok di Kampung Aparuka umumnya lebih tinggi dibandingkan di kota Timika karena faktor transportasi dan pasokan dari luar kampung. Barang-barang kebutuhan rumah tangga sebagian besar didapat saat berbelanja di luar kampung Aparuka pada kios-kios di kampung terdekat seperti Kokonau, Migiwia, Atapo dan Mimika.

Secara keseluruhan, struktur harga komoditas di Kampung Aparuka menunjukkan tingginya biaya hidup di wilayah terpencil dengan daya beli masyarakat yang relatif rendah. Ketergantungan pada pasokan dari luar kampung, mahalnya transportasi dan BBM, serta terbatasnya sumber pendapatan menyebabkan pola konsumsi masyarakat bersifat sederhana dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi ini mempertegas perlunya intervensi kebijakan untuk menekan biaya distribusi, memperkuat produksi dan pengolahan lokal, serta

meningkatkan pendapatan masyarakat agar ketahanan ekonomi rumah tangga dapat terjaga secara berkelanjutan. Kisaran harga bahan pokok antara lain:

Tabel 3.4 Harga Kebutuhan Sembako, Pakaian Tahun 2025

No.	Jenis Komoditas	Harga (Rp)/Satuan	Keterangan
I	Sayuran, buah, ubi, hasil laut		
01.	Kangkung dan bayam	5.000/ikat	Kecil/besar
02.	Tomat	5.000/tumpuk	
03.	Cabe	5.000/tumpuk	
04.	Pisang	20.000/sisir	Kecil/besar
05.	Ubi-ubian	50.000/tumpuk	
06.	Sagu	30.000/potong	
07.	Ikan basah	15.000/ekor	
08.	Udang Laut	45.000/kg	
09.	Udang Kali	3.000/ekor	
10.	Karaka	30.000/ekor	
II	Jenis sembilan bahan pokok		
01.	Beras	18.000/kg	
02.	Gula pasir	25.000/kg	
03.	Garam	9.000/bungkus	
04.	Minyak goreng	30.000/liter	
05.	Minyak tanah	15.000/liter	
06.	Susu kaleng	12.000/kaleng	Cap Nona
07.	Supermi	5.000/bungkus	
08.	Kopi	8.000/bungkus	
09.	Telur	5.000/buah	
10.	Sabun	5.000/batang	
III	Jenis rokok		
01.	Gudang garam filter kecil	35.000/bungkus	
02.	Gudang garan filter besar	45.000/bungkus	
03.	Shag jenis anggur Kupu	8.000/bungkus	
04.	TROY	35.000/bungkus	
IV	Pakain dan alat tulis		
01.	Baju T-shirt	60.000/buah	*All Size*
02.	Kemeja	60.000/buah	
03.	Kain sarung	50.000/buah	
04.	Buku tulis	3.000/buah	
05.	Bolpoint	5.000/buah	
06.	Pensil	3.000/buah	
V	Jenis usaha pertanian		
01.	Kelapa	1000/buah	
VI	Jenis bahan bakar minyak (BBM)		
01.	Bensin	18.000/liter	
02.	Minyak tanah	15.000/liter	

Sumber: Data Primer, 2025

H. Potensi dan Peluang Ekonomi

Kampung Aparuka memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama sagu, ikan, kepiting, udang, serta hasil kebun dan hasil hutan non-kayu. Potensi budaya seperti kerajinan tangan, tarian tradisional, dan kuliner berbahan sagu juga menjadi kekuatan lokal yang dapat dikembangkan sebagai identitas ekonomi dan

sosial masyarakat. Peluang ekonomi yang dapat ditumbuhkan meliputi agroforestri berbasis sagu dan tanaman lokal, budidaya ikan di perairan sekitar, pengembangan UMKM olahan pangan, serta jasa transportasi kampung yang mendukung mobilitas barang dan orang di pelabuhan. Meskipun demikian, sebagian besar potensi ini belum tergarap optimal karena keterbatasan pengetahuan pengolahan, kurangnya sarana pendukung, serta akses pasar yang masih terbatas.

Tantangan pengembangan ekonomi juga diperkuat oleh minimnya dukungan eksternal, baik dari pemerintah maupun perusahaan yang selama ini belum berjalan secara konsisten dan belum disertai pendampingan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan pemanfaatan potensi lokal masih berada pada tahap dasar, sehingga memerlukan intervensi terarah agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat kampung Aparuka.

I. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kampung Aparuka pada umumnya masih berada pada kategori rendah**.** Rata-rata pendapatan rumah tangga berada di bawah Rp1.000.000 per bulan**,** sehingga masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebesar Rp1.099.143. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga memiliki daya beli yang sangat terbatas dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan, baik pangan, kesehatan, pendidikan lanjutan, maupun kebutuhan sosial lainnya.

Sebaran tingkat kesejahteraan antar rumah tangga relatif seragam**,** dengan mayoritas penduduk hidup dalam kondisi miskin. Perbedaan kesejahteraan antar RT maupun antar kelompok warga tidak terlalu mencolok. Pengecualian hanya terdapat pada sebagian kecil penduduk pendatang yang memiliki usaha kecil seperti kios dan memperoleh pendapatan yang lebih tetap, sehingga berada pada kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan warga asli kampung. Namun, jumlah kelompok ini sangat terbatas dan belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan kampung secara luas.

Keterbatasan kesejahteraan tersebut diperkuat oleh rendahnya akses terhadap layanan dasar, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan minimnya sarana transportasi. Mobilitas masyarakat menjadi kendala utama karena tidak tersedianya transportasi reguler. Layanan pendidikan formal di Kampung Aparuka hanya tersedia hingga jenjang Sekolah Dasar**,** sementara untuk melanjutkan ke jenjang SMP dan

SMA, anak-anak harus pergi ke pusat distrik dengan jarak dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Dalam bidang kesehatan, layanan kesehatan tidak tersedia secara rutin di tingkat kampung, sehingga masyarakat sepenuhnya bergantung pada fasilitas kesehatan yang berada di tingkat distrik. Untuk memperoleh pelayanan medis, warga harus melakukan perjalanan ke ibu kota distrik yang memerlukan biaya tambahan, terutama untuk pembelian bahan bakar, yang bagi keluarga berpendapatan rendah menjadi beban berat dan sering kali tidak terjangkau. Akibatnya akses layanan kesehatan bersifat tidak merata dan selektif, di mana hanya kasus-kasus yang dianggap sangat mendesak atau darurat yang mendorong masyarakat untuk berobat. Dalam banyak situasi, warga memilih menunda atau tidak mencari layanan kesehatan formal, sehingga upaya pencegahan penyakit, pemeriksaan rutin, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak menjadi kurang optimal. Kondisi ini juga memperkuat ketergantungan masyarakat pada pengobatan tradisional dan perawatan mandiri di tingkat rumah tangga, yang berisiko memperburuk kondisi kesehatan ketika penyakit tidak tertangani sejak dini.

Dalam pola konsumsi rumah tangga, sebagian besar keluarga memprioritaskan pemenuhan pangan sederhana untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sehari-hari. Pola makan umumnya dua kali sehari, dengan menu yang didominasi bahan pangan lokal seperti sagu, ikan, dan hasil kebun. Konsumsi pangan bergizi seimbang masih terbatas dan sangat bergantung pada ketersediaan alam serta kemampuan ekonomi keluarga. Sementara itu, biaya pendidikan dasar relatif tidak menjadi beban utama karena adanya kebijakan sekolah gratis dari pemerintah, meskipun biaya tidak langsung seperti perlengkapan sekolah dan transportasi tetap dirasakan oleh keluarga.

Berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sosial lainnya juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga Kampung Aparuka yang seharusnya berhak menerima. Ketidakmerataan ini terutama disebabkan oleh lemahnya kelengkapan administrasi kependudukan, di mana masih terdapat warga yang belum memiliki e-KTP. Akibatnya, mereka tidak tercatat dalam basis data resmi penerima bantuan,

sehingga semakin memperkuat kerentanan kesejahteraan masyarakat Kampung Aparuka secara struktural dan berkelanjutan.

G. Keamanan dan Ketertiban

1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kampung Aparuka secara umum tergolong kondusif dan relatif stabil, dengan tingkat gangguan sosial yang rendah serta tidak berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Peristiwa yang muncul biasanya bersifat sporadis dan tidak berlangsung secara berulang dalam jangka panjang. Beberapa kejadian yang pernah terjadi antara lain perselisihan antarwarga, keributan ringan, maupun konflik dalam rumah tangga yang umumnya dipicu oleh persoalan internal keluarga. Konsumsi minuman beralkohol, baik yang berasal dari luar kampung maupun hasil olahan lokal seperti bobo, menjadi salah satu faktor yang memicu perilaku tidak terkendali pada sebagian warga, terutama di kalangan pemuda. Di samping itu, meskipun jumlahnya sangat terbatas, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan tekanan ekonomi, kecemburuan, serta dinamika relasi dalam keluarga.

Selain gangguan sosial, terdapat pula potensi ancaman keamanan yang bersumber dari kondisi alam, meskipun intensitasnya sangat rendah. Warga yang beraktivitas di sungai, rawa, atau kawasan hutan sesekali menghadapi risiko keberadaan ular atau buaya, sementara pencari hasil hutan berpotensi mengalami gangguan seperti gigitan ulat. Walaupun kejadian semacam ini jarang terjadi, potensi bahayanya menimbulkan kewaspadaan tersendiri, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada pemanfaatan sumber daya alam. Secara umum, Kampung Aparuka tidak memiliki wilayah yang dikategorikan rawan, dan gangguan keamanan cenderung terjadi secara insidental tanpa pola waktu tertentu.

Kelompok yang relatif rentan terhadap dampak gangguan keamanan meliputi pemuda yang terpapar konsumsi minuman beralkohol, perempuan dan anak yang berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta warga yang bekerja di lingkungan hutan dan perairan. Faktor pemicu kondisi tersebut antara lain konsumsi alkohol, ketegangan emosional dalam keluarga, kurangnya pengawasan, serta risiko ekologis. Dampak yang dirasakan biasanya berupa meningkatnya rasa waspada dan kehati-hatian dalam beraktivitas. Namun demikian, kuatnya ikatan sosial, mekanisme

penyelesaian masalah secara kekeluargaan, serta peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga ketertiban, menjadikan stabilitas keamanan di Kampung Aparuka tetap terpelihara dengan baik.

2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban di Kampung Aparuka diselenggarakan melalui sistem kelembagaan lokal yang menempatkan Linmas sebagai unsur utama dalam menjaga stabilitas lingkungan. Keberadaan Linmas memberi rasa aman bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan kampung dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang bersifat ringan. Dalam keseharian, berbagai persoalan sosial umumnya dapat ditangani di tingkat kampung melalui mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintahan kampung, serta unsur Linmas. Proses penyelesaian tersebut dilakukan secara cepat dan terbuka dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, sehingga konflik tidak berkembang dan keharmonisan antarwarga tetap terpelihara.

Upaya pencegahan gangguan keamanan juga dilakukan melalui penguatan komunikasi sosial, patroli dan pemantauan lingkungan secara rutin oleh Linmas, serta peran aktif tokoh masyarakat dalam memberikan imbauan terkait ketertiban umum, terutama pada situasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan seperti kegiatan adat, konsumsi minuman beralkohol, maupun perselisihan dalam rumah tangga. Namun demikian, tantangan masih dihadapi karena letak Kampung Aparuka yang relatif jauh dari Pos Polisi Sektor (Polsek) Mimika Barat dan Pos Komando Rayon Militer (Koramil) 1710-01/Kokonau yang berpusat di Kampung Atapo. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas keamanan berbasis masyarakat serta peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, agar stabilitas dan ketertiban Kampung Aparuka dapat terus terjaga.

H. Kelembagaan Kampung

1. Lembaga Pemerintah

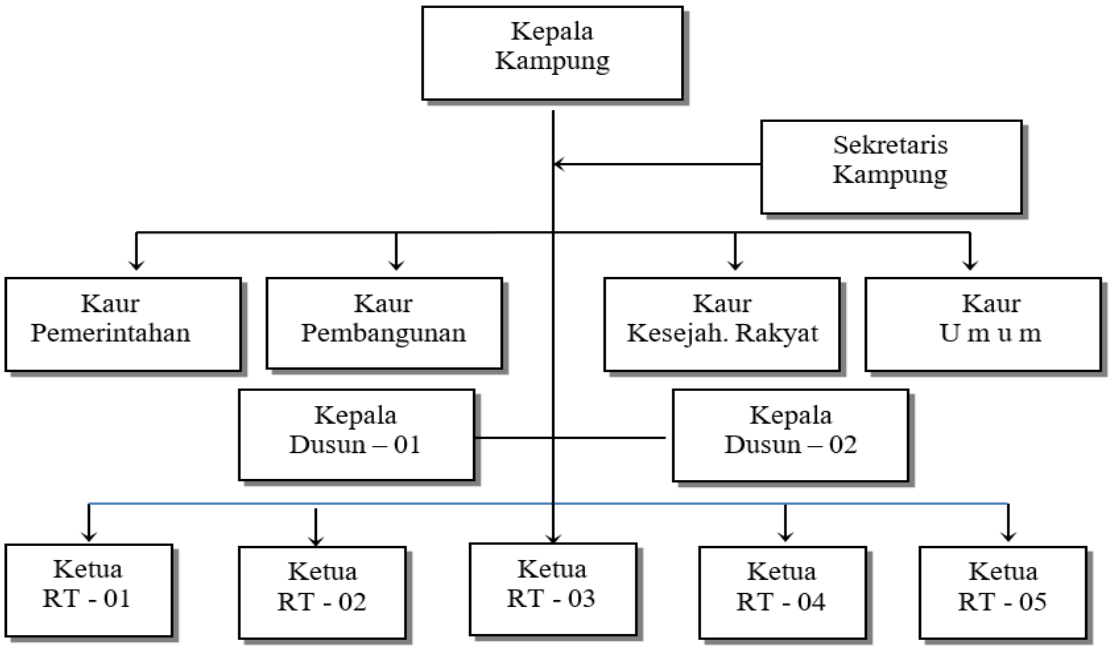
Penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Aparuka berada di bawah kepemimpinan Kepala Kampung Yonas Kenaroke yang didukung oleh Sekretaris Kampung Fransiskus Kamawiyaya, serta jajaran Kepala Urusan yang mencakup Kaur Pembangunan Yohanis Kamawiyaya dan Kaur Keuangan Agustinus Kanurako dan Seksi Pemerintahan Yonas Kenaroke dan Stanislaus Merawejau. Selain itu,

struktur kewilayahan diperkuat oleh dua Kepala Dusun. Kepala Dusun I Frederikus Yaota dan Kepala Dusun II Agustinus Meraweyau, dengan 5 Ketua Rukun Tetangga (RT).

Susunan kelembagaan tersebut membentuk sistem tata kelola pemerintahan kampung yang berfungsi mengelola pelayanan dasar, melaksanakan program pembangunan, serta mengoordinasikan berbagai kepentingan warga di tingkat paling bawah. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas memungkinkan roda pemerintahan berjalan secara tertib, efektif, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik masyarakat Kampung Aparuka.

Struktur pemerintahan Kampung Aparuka sebagai berikut:

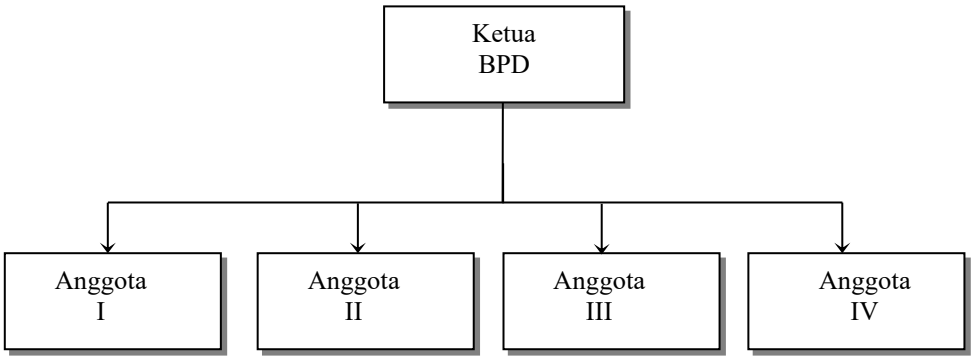
Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Kampung Aparuka



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra Kepala Kampung dalam proses pengambilan keputusan, terdiri dari Ketua (Yustinus Utuma), dengan 4 orang Anggota-1 (Fransiskus Maupati), Anggota-2 (Wilemus Yaota) dan Anggota-3 (Yoseph Neraweyau), Anggota-4 (Agnes Ewata).

Adapun struktur BPD di kampung Atapo sebagai berikut:

Gambar 3.2. Struktur BPD Kampung Aparuka



2. Lembaga Politik

Masyarakat Kampung Aparuka memperlihatkan tingkat kematangan politik yang terus meningkat, yang tercermin dari partisipasi warga yang tinggi dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada Tahun 2024. Sebagian besar penduduk yang memiliki hak pilih hadir di tempat pemungutan suara dan menggunakan haknya secara bertanggung jawab, menandakan tumbuhnya kesadaran politik di tingkat kampung. Antusiasme tersebut tidak hanya tampak pada hari pemungutan suara, tetapi juga melalui ketertarikan warga dalam mengikuti informasi politik, memahami alternatif pilihan, serta menjaga suasana kampung tetap tertib dan kondusif sepanjang tahapan pemilu. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang semakin kuat mengenai arti penting partisipasi politik dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kelancaran pelaksanaan pemilu di Kampung Aparuka didukung oleh koordinasi yang erat antara para pemangku kepentingan. Lembaga penyelenggara pemilu, mulai dari KPU Kabupaten Mimika, PPD Distrik Mimika Barat, hingga KPPS Kampung Aparuka, bekerja secara sinergis dengan pemerintah kampung, tokoh adat, dan perwakilan partai politik. Kerja sama tersebut menciptakan iklim yang kondusif dan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penyaluran logistik, proses pemungutan suara, hingga penghitungan hasil. Keterlibatan tokoh adat dan aparat kampung dalam pengawasan turut memperkuat legitimasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Kolaborasi yang terbangun selama penyelenggaraan pemilu berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini melalui komunikasi yang efektif antara penyelenggara dan masyarakat. Transparansi dalam proses penghitungan suara juga menjadi perhatian utama untuk memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan pilihan warga

Aparuka. Secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu di Kampung Aparuka tidak hanya mencerminkan komitmen masyarakat terhadap demokrasi, tetapi juga menunjukkan efektivitas kerja sama antar-lembaga dalam mewujudkan proses politik yang jujur, adil, dan dapat dipercaya.

3. Lembaga Kamtibmas

Kelembagaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kampung Aparuka ditopang oleh peran Lembaga Kamtibmas melalui Kamra dan Linmas yang aktif menjaga stabilitas sosial di tingkat kampung. Kedua unsur ini terlibat langsung dalam pengamanan kegiatan masyarakat, pemantauan lingkungan permukiman, serta upaya pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam aktivitas harian maupun pada momentum tertentu seperti kegiatan adat, keagamaan, dan agenda pemerintahan kampung.

Keberadaan Kamra dan Linmas tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengamanan, tetapi juga menjadi pengikat solidaritas sosial yang memperkuat rasa aman di tengah masyarakat. Partisipasi warga yang tinggi dalam mendukung tugas-tugas tersebut mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya ketertiban bersama, sehingga kehidupan sosial di Kampung Aparuka dapat berlangsung secara tertib, kondusif, dan harmonis.

I. Sarana dan Prasarana

1. Transportasi dan Komunikasi

Aksesibilitas di Kampung Aparuka masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada sarana jalan darat yang umumnya berupa jalan tanah dengan kondisi rusak dan belum tertata secara permanen. Pada musim hujan, kondisi ini semakin menyulitkan mobilitas warga karena jalan menjadi licin dan sulit dilalui. Keterbatasan infrastruktur darat tersebut menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada transportasi air sebagai sarana utama pergerakan orang dan barang.



Dermaga Kampung Aparuka (dok.ippm)

Moda transportasi yang paling umum digunakan adalah perahu bermesin atau longboat serta kapal rakyat yang melayani perjalanan antar kampung dan menuju

pusat distrik. Konektivitas antara Kampung Aparuka dengan ibu kota Distrik Mimika Barat memerlukan waktu tempuh sekitar tiga hingga empat jam perjalanan air, bergantung pada kondisi cuaca dan arus. Akses ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar minyak; ketika stok minyak menipis, frekuensi perjalanan berkurang dan mobilitas masyarakat menjadi terhambat, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun layanan kesehatan.

Sebagai sarana transportasi umum, perahu rakyat menjadi pilihan utama yang digunakan secara bersama oleh warga. Meskipun berperan penting dalam menghubungkan Aparuka dengan wilayah lain, layanan ini belum memiliki jadwal tetap dan sangat bergantung pada permintaan serta kondisi alam. Situasi tersebut mencerminkan bahwa akses transportasi di Kampung Aparuka masih rentan dan memerlukan perhatian khusus melalui peningkatan infrastruktur serta jaminan ketersediaan sarana transportasi yang lebih andal dan berkelanjutan.


Loangboat motor tempel di Aparuka (dok.ippm)

2. Air Bersih dan Sanitasi

Sarana penyediaan air bersih di Kampung Aparuka masih sangat terbatas dan belum didukung oleh sistem air bersih permanen. Infrastruktur yang tersedia saat ini didominasi oleh penampungan air hujan di tingkat rumah tangga sebagai sumber utama air bersih. Selain itu, terdapat jaringan air sederhana yang hanya melayani sebagian kecil wilayah permukiman dan belum memiliki kapasitas maupun jangkauan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga secara berkelanjutan.

Dari sisi prasarana sanitasi, Kampung Aparuka belum memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan lingkungan. Sebagian besar rumah tangga belum dilengkapi jamban sehat dengan septik tank, dan kampung belum memiliki sarana sanitasi komunal yang memadai. Keterbatasan infrastruktur sanitasi ini menunjukkan belum tersedianya sistem pengelolaan limbah domestik yang terencana dan terstandar di tingkat kampung.

Pengelolaan sampah rumah tangga juga belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kampung belum memiliki tempat penampungan sampah

sementara, sistem pengangkutan, maupun fasilitas pembuangan akhir. Ketiadaan infrastruktur tersebut menyebabkan pengelolaan sampah dilakukan secara individual tanpa dukungan sistem lingkungan yang terorganisasi.

Selain itu, prasarana drainase lingkungan belum tersedia secara memadai. Kampung Aparuka tidak memiliki jaringan saluran drainase yang terbangun dengan baik, sehingga air hujan sulit dialirkan secara terkontrol. Ketiadaan prasarana ini menyebabkan munculnya genangan air di beberapa titik permukiman, terutama pada musim hujan, yang menunjukkan lemahnya infrastruktur pengelolaan air lingkungan secara keseluruhan.

Secara umum, keterbatasan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan lingkungan di Kampung Aparuka memerlukan perhatian serius melalui pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi, berorientasi pada kesehatan lingkungan, dan berkelanjutan.

3. Penerangan / Energi

Sarana penyediaan energi listrik di Kampung Aparuka saat ini sepenuhnya mengandalkan infrastruktur panel surya sebagai sumber utama penerangan dan energi rumah tangga. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi alternatif karena belum tersambungnya kampung dengan jaringan listrik konvensional. Namun demikian, infrastruktur panel surya yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh wilayah permukiman, sehingga distribusi listrik masih bersifat parsial dan tidak merata antar rumah tangga.

Dari sisi kapasitas dan kontinuitas layanan, prasarana panel surya menunjukkan keterbatasan yang cukup signifikan. Durasi pasokan listrik bervariasi antar lokasi, mulai dari hanya pada malam hari hingga sekitar 12 jam per hari, sementara unit yang mampu beroperasi selama 24 jam masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan energi, sistem distribusi, serta dukungan teknis belum memadai untuk menjamin layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan.

Kondisi fisik sarana panel surya juga mengalami penurunan fungsi. Sejumlah panel, baterai, dan komponen pendukung lainnya dilaporkan mengalami kerusakan akibat minimnya perawatan rutin dan keterbatasan kemampuan teknis pemeliharaan di tingkat kampung. Ketiadaan sistem pengelolaan dan perawatan yang terstruktur menyebabkan kapasitas produksi listrik menurun, sehingga hanya sebagian kecil rumah tangga yang dapat memperoleh pasokan listrik secara relatif stabil.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana energi listrik di Kampung Aparuka masih berada pada kondisi terbatas dan memerlukan peningkatan baik dari sisi cakupan, kapasitas, maupun keberlanjutan pengelolaan. Penguatan infrastruktur energi terbarukan, disertai sistem pemeliharaan yang memadai, menjadi kebutuhan mendasar untuk menjamin ketersediaan listrik yang andal di tingkat kampung.

4. Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan formal di Kampung Aparuka saat ini baru tersedia pada jenjang Sekolah Dasar, yang berfungsi sebagai fondasi awal dalam mempersiapkan sumber daya manusia jangka panjang bagi pembangunan kampung. Keberadaan Sekolah Dasar Negeri Aparuka menjadi sarana utama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar sebagai bekal peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan hidup. Pendidikan pada jenjang ini dipandang strategis karena berperan dalam membangun kapasitas masyarakat di masa depan, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan, membuka peluang kerja baru, mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.



Gedung SD Negeri Aparuka (dok.ippm)

Dari sisi sarana fisik, bangunan sekolah berada dalam kondisi relatif baik dan layak digunakan. Gedung sekolah berbentuk rumah panggung dengan struktur tiang kayu, dinding papan, serta atap seng, dan dilengkapi dengan enam ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi bangunan yang masih terawat memberikan lingkungan belajar yang cukup aman dan nyaman bagi siswa, meskipun tetap memerlukan pemeliharaan berkala agar keberlanjutannya dapat terjaga.

Akses pendidikan dasar bagi anak-anak kampung relatif mudah karena lokasi gedung SD berada dekat dengan permukiman warga. Namun demikian, keterbatasan jenjang pendidikan menjadi tantangan utama. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan SMA harus bersekolah di Kokonao, ibu kota Distrik Mimika Barat, dengan waktu tempuh sekitar tiga hingga empat jam menggunakan speed boat. Jarak yang jauh serta ketergantungan pada moda transportasi air menuntut kesiapan biaya, sarana transportasi, dan dukungan keluarga agar keberlanjutan pendidikan anak dapat terjamin.

5. Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kampung Aparuka masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan kesehatan dasar. Hingga saat ini, kampung belum memiliki fasilitas kesehatan permanen seperti puskesmas pembantu maupun posyandu yang berfungsi secara rutin. Selain itu tidak terdapat bangunan khusus yang dapat digunakan sebagai ruang pemeriksaan, pelayanan ibu dan anak, penyimpanan obat, maupun tindakan medis sederhana. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan belum dapat dilaksanakan secara berkesinambungan di dalam kampung.

Dari sisi prasarana penunjang rujukan, Kampung Aparuka tidak memiliki akses transportasi kesehatan yang memadai. Tidak tersedia sarana transportasi khusus seperti perahu medis atau fasilitas evakuasi darurat, sehingga dalam kondisi kegawatdaruratan masyarakat harus menempuh perjalanan jauh melalui jalur sungai dengan waktu tempuh yang relatif lama. Ketiadaan prasarana ini meningkatkan risiko keterlambatan penanganan medis, terutama bagi ibu hamil, balita, dan penderita penyakit berat.

Ketersediaan sarana pendukung kesehatan lingkungan juga masih sangat terbatas. Kampung hanya memiliki 12 unit penampung air hujan sebagai sumber air bersih, belum tersedia sumur galian atau sistem air bersih permanen, serta hanya terdapat dua unit jamban sehat umum. Keterbatasan prasarana sanitasi tersebut berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit berbasis lingkungan.

Selain itu, sarana obat-obatan dan alat kesehatan dasar belum tersedia secara memadai di tingkat kampung. Tidak terdapat tempat penyimpanan obat yang layak maupun peralatan medis sederhana yang dapat digunakan untuk penanganan awal. Secara keseluruhan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan ini menjadi tantangan struktural peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kampung Aparuka dan memerlukan intervensi pembangunan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

6. Ekonomi

Ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi di Kampung Aparuka hingga saat ini masih sangat terbatas dan belum mampu mendukung optimalisasi potensi ekonomi masyarakat. Kampung ini belum memiliki fasilitas perdagangan dasar seperti kios, pasar kampung, maupun pasar rakyat, sehingga aktivitas pemenuhan

kebutuhan pokok serta pemasaran hasil perikanan dan hasil alam lainnya sepenuhnya bergantung pada pasokan dan jaringan distribusi dari luar kampung. Kondisi ini menyebabkan rantai ekonomi masyarakat menjadi panjang, biaya transaksi relatif tinggi, dan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar.

Dari sisi infrastruktur pendukung produksi dan pascapanen, Kampung Aparuka belum dilengkapi dengan fasilitas strategis seperti gudang penyimpanan hasil tangkapan, dermaga yang representatif untuk aktivitas bongkar muat, maupun *cold storage* untuk menjaga kualitas dan daya simpan ikan serta kepiting bakau. Ketiadaan sarana tersebut membatasi kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil produksi secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus mempersempit peluang pengembangan usaha berbasis perikanan.

Selain itu, sarana pendukung kelembagaan ekonomi juga belum berkembang secara memadai. Akses terhadap layanan pembiayaan formal seperti perbankan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, maupun kelompok simpan pinjam belum tersedia secara aktif dan masih berada pada tahap perintisan. Di sisi lain, pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan internet, belum optimal sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ekonomi digital, pemasaran daring, maupun penguatan jejaring usaha.

Secara keseluruhan, keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi tersebut menjadi faktor struktural yang menghambat percepatan pembangunan ekonomi Kampung Aparuka. Namun demikian, kondisi ini sekaligus membuka ruang intervensi kebijakan melalui penguatan infrastruktur dasar, fasilitas pendukung perikanan, serta kelembagaan ekonomi kampung yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan.

7. Peribadatan

Kampung Aparuka telah memiliki sarana keagamaan berupa Gereja Katolik yang dibangun melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika sejak penetapan kampung secara administratif pada tahun 2011. Gereja ini berfungsi sebagai gereja stasi dari Paroki Maria Bintang Laut Kokonau, menjadi fasilitas ibadah utama masyarakat kampung ini.



Gereja Stasi Aparuka (dok.ippm)

Dari sisi kondisi fisik, bangunan gereja tergolong layak dan terpelihara dengan baik. Struktur bangunan permanen, ruang ibadah yang memadai, serta kelengkapan fasilitas penunjang seperti MCK yang berfungsi dengan baik menunjukkan bahwa sarana keagamaan ini telah memenuhi kebutuhan dasar umat dalam melaksanakan peribadatan secara nyaman dan tertib.

Selain bangunan utama gereja, kampung juga telah memiliki prasarana pendukung yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan secara rutin dan berkesinambungan. Keberadaan fasilitas ini menjadikan gereja tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan rohani yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Kampung Aparuka.

Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana keagamaan di Kampung Aparuka berada pada kondisi relatif memadai dan stabil, serta menjadi salah satu infrastruktur sosial yang telah berkembang lebih baik dibandingkan sektor lainnya di kampung.

BAGIAN IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Infrastruktur Kampung Rasa Kota

Konsep infrastruktur kampung berstandar kota selaras dengan paradigma "membangun dari kampung ke kota", yang menempatkan kampung sebagai fondasi pertumbuhan dengan memperkuat kualitas infrastrukturnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Gagasan membangun kampung rasa kota menjadi wujud praktisnya, yaitu menghadirkan pelayanan, kenyamanan dan aksesibilitas setara perkotaan tanpa menghilangkan identitas sosial, budaya dan kearifan lokal.

Kebutuhan infrastruktur kampung rasa kota di kampung Aparuka pada tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota
Di Kampung Aparuka

No	Komponen konomi	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Perumahan dan Permukiman	Rumah warga didominasi semi permanen dan non permanen berbahan kayu, banyak yang tergolong RTLH, tanpa MCK keluarga dan rentan banjir tahunan	Program peningkatan kualitas rumah layak huni (RTLH), pembangunan MCK keluarga, serta penataan permukiman aman banjir	DPMK, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Air Bersih	Sumber air berasal dari air hujan dan sungai, belum ada sistem air bersih permanen	Pembangunan sarana air bersih (sumur bor/sistem gravitasi), tandon air, dan jaringan distribusi	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
3.	Sanitasi dan Drainase	Tidak tersedia jamban sehat, pembuangan limbah ke sungai, drainase terbatas	Pembangunan jamban sehat, sistem sanitasi komunal, dan perbaikan drainase permukiman	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
4.	Listrik dan Energi	Belum tersedia listrik PLN, warga mengandalkan genset pribadi terbatas	Pengadaan listrik desa (PLN/PLTS), penerangan jalan kampung	Dinas ESDM, PLN
5.	Jalan dan Akses Transportasi	Jalan kampung sebagian besar tanah, akses sulit saat hujan dan banjir	Peningkatan jalan kampung (semenisasi), penguatan akses transportasi sungai	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

Sumber: Hasil FGD, 2025

B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa

kota, yaitu memperkuat aktivitas ekonomi sejak level kampung agar menjadi fondasi pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, potensi unggulan didorong untuk dikelola secara lebih profesional dengan dukungan fasilitas yang setara standar perkotaan mulai dari akses pasar modern, fasilitas penyimpanan layak, hingga pendampingan kelembagaan dan legalitas usaha tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai komunal masyarakat.

Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di kampung Aparuka pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal
Di kampung Aparuka

No	Komponen Ekonomi	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Perikanan Tangkap	Aktivitas nelayan masih tradisional, alat tangkap sederhana, hasil dijual ke Kokonao dengan biaya tinggi	Bantuan alat tangkap, cold storage sederhana, dan akses pemasaran langsung	Dinas Perikanan
2.	Pertanian dan Perkebunan	Berkebun bersifat subsisten, belum ada pengolahan hasil	Pendampingan pertanian, pengolahan hasil kebun, dan diversifikasi pangan lokal	Dinas Pertanian
3.	Kelembagaan Ekonomi	Belum ada koperasi/BUMK aktif, kios kampung tidak tersedia	Pembentukan dan penguatan BUMK/koperasi kampung	DPMK, Dinas Koperasi dan UMKM
4.	Akses Pasar dan Modal	Tidak ada pasar lokal, akses modal usaha sangat terbatas	Fasilitasi akses permodalan UMKM dan pasar kampung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Usaha Perempuan dan Pemuda	Potensi ada, namun belum terorganisir	Pelatihan UMKM, kewirausahaan pemuda dan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber: Hasil FGD, 2025

C. SDM, Budaya dan Lingkungan Berkelanjutan

Penguatan SDM, budaya dan lingkungan berkelanjutan merupakan inti dari konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu menghadirkan kualitas hidup modern tanpa meninggalkan jati diri lokal. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian nilai budaya, dan pengelolaan lingkungan yang sehat, kampung dapat tumbuh layak, maju, dan berdaya saing, namun tetap berakar pada kearifan lokal dan harmoni alam.

Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan di kampung Aparuka pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan
Di kampung Aparuka

No	Komponen	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Pendidikan	Hanya tersedia SD, partisipasi lanjut SMP–SMA rendah karena jarak	Dukungan transportasi pendidikan, beasiswa, dan pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan Masyarakat	Tidak ada tenaga kesehatan tetap, akses Puskesmas jauh	Penyediaan tenaga kesehatan berkala dan layanan keliling	Dinas Kesehatan
3.	Budaya dan Kearifan Lokal	Nilai adat dan gotong royong masih kuat namun belum terintegrasi dalam pembangunan	Penguatan peran tokoh adat dan pelestarian budaya lokal	Dinas Kebudayaan
4.	Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Kampung rawan banjir, sedimentasi sungai, dan erosi	Penataan sungai, talud pengendali banjir, dan edukasi mitigasi bencana	BPBD, Dinas Lingkungan Hidup
5.	Kepemudaan	Aktivitas pemuda belum terorganisir	Pembinaan kepemudaan dan kegiatan produktif	Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber: Hasil FGD, 2025

BAGIAN V. P E N U T U P

Kampung Aparuka yang berada di Distrik Mimika Barat merupakan sebuah komunitas dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang berpadu dengan karakter dinamika sosial yang khas. Berbagai upaya peningkatan infrastruktur terus dilaksanakan guna mendekati standar kawasan perkotaan, meliputi perbaikan jalan poros dan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penerangan wilayah, serta pembangunan fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau dan sarana pendidikan. Namun demikian, permasalahan mendasar masih dijumpai pada aspek kelayakan hunian, sanitasi, dan pemenuhan layanan dasar, sehingga ketiga aspek tersebut menjadi prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang dijalankan secara sinergis oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.

Dari aspek ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, masyarakat Aparuka memiliki potensi produktif yang cukup menjanjikan, khususnya pada sektor perikanan serta pengembangan UMKM berbasis bahan pangan lokal seperti sagu. Optimalisasi potensi tersebut memerlukan dukungan berupa pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta perluasan akses terhadap permodalan dan pasar agar dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan karakter, serta pengembangan seni dan keterampilan generasi muda mencerminkan komitmen masyarakat dalam menjaga identitas lokal sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Secara umum, Kampung Aparuka tengah berada pada tahapan transformasi menuju lingkungan yang lebih modern, layak huni, dan produktif tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya setempat. Pendekatan pembangunan yang mengedepankan prinsip “membangun dari kampung ke kota” dan “kampung rasa kota” berupaya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, pelestarian budaya, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan lokal, dan masyarakat, Kampung Aparuka memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kampung yang maju, inklusif, dan harmonis antara kemajuan modern dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Mimika dalam Angka Tahun 2024,* Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika

Badan Pusat Statistik. (2025). *Distrik Mimika Barat dalam Angka Tahun 2024,* Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2025). *Data Agregat Kependudukan (Semester I Tahun 2025).* Dinas Dukcapil, Timika

Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*